

**KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
PERMUKIMAN KUMUH**

**(Studi Kasus: Permukiman Kumuh di Kawasan
Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu)**

SKRIPSI

Oleh

IBRAHIM JABIR B

NIM 45 18 042 058



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2022**

**KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
PERMUKIMAN KUMUH**

**(Studi Kasus: Permukiman Kumuh di Kawasan Cimpu,
Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Teknik (S.T)

BOSOWA

Oleh

IBRAHIM JABIR B

4518042058

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN PERMUKIMAN KUMUH (Studi Kasus: Permukiman Kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu)

Disusun dan Diajukan Oleh

IBRAHIM JABIR B

NIM 45 18 042 058

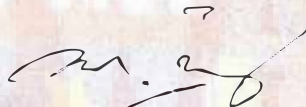
Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Ir. Rudi Latief, ST., M.Si.
NIDN : 09-170768-01

Pembimbing II



Muh. Idris Takino, ST., MSP
NIDN 09-021075-02

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Teknik



Dr. H. Nasrullah, ST., MT
NIDN : 09-090773-01

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota



Dr. S. Kamran Aksa, S.T., M.T
NIDN : 09-110774-01

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor: A.1039/SK/FT/UNIBOS/VII/2022 Pada Tanggal 15 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan Dosen Penguji Ujian Tutup Mahasiswa Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Maka:

Pada Hari/Tanggal : Senin, 15 Agustus 2022

Skripsi Atas Nama : Ibrahim Jabir B

Nomor Pokok : 4518042058

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S-1), pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.

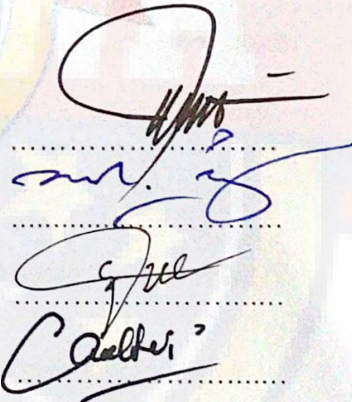
TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ir. Rudi Latief, ST., M.Si.

Sekretaris : Muh. Idris Taking. ST., MSP

Anggota : 1. Dr. Ir. Syahriar Tato, MS

2. Jufriady, ST. MSP



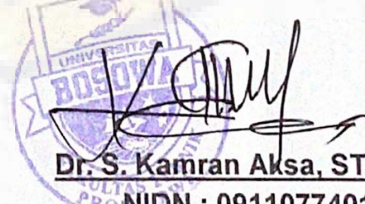
.....
.....
.....
.....

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR



Dr. Ir. H. Nasrullah, ST., MT.
NIDN : 0908077301

KETUA JURUSAN
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA



Dr. S. Kamran Aksa, ST., MT.
NIDN : 0911077401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IBRAHIM JABIR B
Nim : 45 18 042 058
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis/ajukan ini benar-benar karya saya sendiri, dengan arahan komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima segala konsekuensi / sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2022

Yang Menyatakan,



Ibrahim Jabir B.

ABSTRAK

Ibrahim Jabir B, 2022 “Konsep Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Permukiman Kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu)”. Dibimbing oleh Dr. Ir. Rudi Latief, ST., M.Si dan Muh. Idris Taking, ST., MSP.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis tingkat kekumuhan dan merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *mix method*. Untuk menganalisis tingkat kekumuhan di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu menggunakan alat analisis skoring baseline sedangkan untuk merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Cimpu menggunakan desain teknis dalam bentuk tiga dimensi (3D).

Kesimpulan utama dalam penelitian ini yaitu Berdasarkan hasil analisis skoring baseline menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu masuk dalam kategori kumuh sedang. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan, masih luasnya area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan dan memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk. Selain itu masih luasnya area yang memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau, dan juga di Kawasan Cimpu tidak memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran dan konsep pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu terdiri atas dua, yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas. Konsep pencegahan dilaksanakan melalui pola pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan konsep peningkatan kualitas dilaksanakan melalui pola pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali.

Kata kunci: Konsep, Pencegahan, Peningkatan Permukiman Kumuh

ABSTRACT

Ibrahim Jabir B, 2022 "*Concept of Prevention and Improvement of Slums (Case Study: Slum Settlement in Cimpu Area, Suli District, Luwu Regency)*". Supervised by Dr. Ir. Rudi Latief, ST., M.Si and Muh. Idris Taking, ST., MSP. The purpose of this study was to analyze the level of slums and formulate the concept of prevention and improvement of the quality of slum settlements in the Cimpu area, Suli District, Luwu Regency.

This type of research is a mix method research. To analyze the level of slums in the Cimpu area, Suli sub-district, Luwu district using a baseline scoring analysis tool, while to formulate the concept of preventing and improving the quality of slum settlements in the Cimpu area, a technical design is used in the form of three dimensions (3D).

The main conclusion in this study is that based on the results of the baseline scoring analysis, it shows that the level of slums in the Cimpu area, Suli District, Luwu Regency is in the medium slum category. This is because there are still many buildings that have densities that are not in accordance with the provisions, there are still large areas that are not served by the environmental road network and have poor road surface quality. In addition, there is still a large area that has dirty and smelly environmental drainage, and also in the Cimpu area does not have fire protection facilities and infrastructure and the concept of prevention and improvement of slum settlements in the Cimpu Area, Suli District, Luwu Regency consists of two, namely prevention and improvement quality. The concept of prevention is implemented through a pattern of supervision, control, and community empowerment, while the concept of quality improvement is implemented through a pattern of restoration, rejuvenation, and resettlement.

Keywords: Concept, Prevention, Slums Improvement

KATA PENGANTAR

Bismilillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa, Pencipta Alam semesta beserta isinya dan tempat berlindung bagi umat Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul "**Konsep Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Permukiman Kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu)**". Shalawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Hj. A. Ippong dan Ayahanda tersayang Muh. Jabir Baharuddin yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayangnya serta perhatian moril dan materilnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat budi baik dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Olehnya dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. H. Nasrullah, S.T, M.T** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar;
2. **Bapak Dr. S. Kamran Aksa, S.T, M.T** selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa
3. **Bapak Dr. Ir. Rudi Latief, ST., M.Si** selaku pembimbing pertama yang telah bersedia mendorong, membimbing, dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan penyelesaian skripsi ini.
4. **Bapak Muh. Idris Taking, ST., MSP** selaku pembimbing kedua yang telah bersedia mendorong, membimbing dan mengarahkan penulis demi kesempurnaan dan penyelesaian skripsi ini.
5. **Bapak Ir. Jufriadi, MSP**, selaku Penasehat Akademik yang telah bersedia membimbing, mengarahkan dan membantu penulis selama di bangku perkuliahan
6. **Bapak Emil Salim Rasyidi, S.T, M.S.c**, yang telah bersedia membimbing, membantu, mengarahkan, mendorong penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. **Seluruh Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota** yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama duduk dibangku kuliah sejak awal hingga selesai;
8. **Bapak Drs. Yasan Asiz, M.Si**, selaku Kepala Tata Usaha Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota yang selalu membantu penulis dalam melengkapi berkas administrasi;

9. **Seluruh Masyarakat Dusun Mura Utara dan Dusun Muara Selatan** yang bersedia untuk diwawancarai serta memberikan data dan pengetahuan tentang lokasi penelitian;
10. Kepada saudari seperjuangan dari kerja praktek, **Rukni Rahayu, Ameliya Magfirah, dan Musfiratul Muthmainnah** terima kasih karena selalu membantu, menemani, dan mau direpotkan selama proses kerja praktek sampai tahap skripsi;
11. Kepada saudara seperjuangan bangku perkuliahan **A. Muh. Iskandar** yang selalu membantu penulis dari awal hingga saat ini;
12. Kepada seluruh saudara-saudara seperjuangan **PWK 2018 (PEACE18)**, yang selalu memberikan dukungan, masukan dan arahan serta memberikan cerita yang sangat berharga dalam kehidupan penulis;
13. Kepada adinda **Esse Syam**, karena telah membantu penulis dalam pengambilan data.

Dengan indra dan hati yang terbuka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini kedepannya. Besar harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Juli 2022

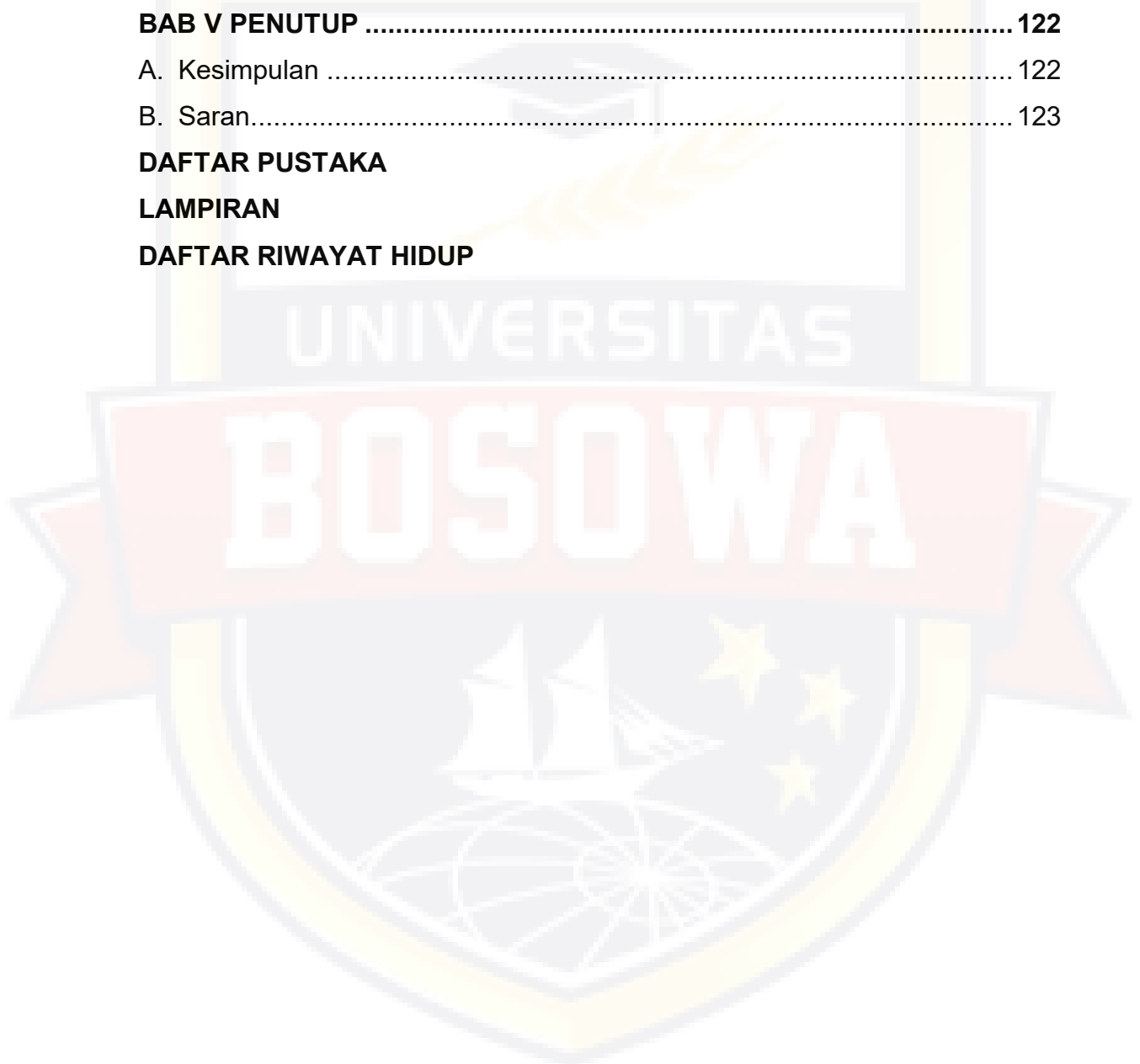
Ibrahim Jabir B.

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Bidang Akademik	5
2. Instansi Pemerintah	5
3. Masyarakat	5
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1. Ruang Lingkup Wilayah	6
2. Ruang Lingkup Materi	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Perumahan dan Permukiman	8
B. Persyaratan Permukiman	10
C. Elemen Dasar Perumahan dan Permukiman.....	12
D. Faktor Penyebab Tumbuhnya Kawasan Permukiman	14
E. Permukiman Kumuh.....	15

F. Faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh	18
G. Indikator Permukiman Kumuh	21
H. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	28
I. Konsep Penanganan Permukiman Kumuh	31
J. Penelitian Terdahulu.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Waktu Penelitian	46
D. Populasi dan Sampel.....	46
1. Populasi	46
2. Sampel.....	47
E. Jenis dan Sumber Data	48
1. Data Primer	48
2. Data Sekunder	49
F. Teknik Pengumpulan Data	49
1. Observasi.....	49
2. Wawancara	50
3. Kajian Kepustakaan	50
G. Variabel Penelitian	51
H. Metode Analisis.....	51
I. Definisi Operasional	56
J. Kerangka Berpikir.....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Gambaran Umum.....	61
1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu	61
2. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan	85

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	90
B. Analisis Tingkat Kekumuhan	96
C. Analisis Konsep Pencegahan Dan Peningkatan Permukiman Kumuh ..	107
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria dan Penilaian Tingkat Kekumuhan	23
Tabel 2.2 Tipologi Perumahan dan Permukiman Kumuh.....	30
Tabel 2.3 Sumber Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Faktor/Parameter Tingkat Kekumuhan	53
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Luwu Menurut Kecamatan.....	62
Tabel 4.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Luwu	64
Tabel 4.3 Topografi di Kabupaten Luwu Tahun 2022	67
Tabel 4.4 Geologi di Kabupaten Luwu Tahun 2022.....	74
Tabel 4.5 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Luwu Tahun 2022	81
Tabel 4.6 Jumlah dan Sebaran Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2020 ...	83
Tabel 4.7 Luas dan Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Suli Tahun 2020.....	85
Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Suli Tahun 2020.....	89
Tabel 4.9 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Suli Tahun 2020	90
Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Parameter Tingkat Kekumuhan di Kawasan Cimpu	97
Tabel 4.11 Kriteria dan Indikator Penentuan Tingkat Kekumuhan di Kawasan Cimpu	99
Tabel 4.12 Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Cimpu.....	106
Tabel 4.13 Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan Cimpu	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian	46
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Luwu	66
Gambar 4.2 Peta Topografi.....	69
Gambar 4.3 Peta Jenis Tanah.....	72
Gambar 4.4 Peta Geologi.....	75
Gambar 4.5 Peta Hidrologi.....	78
Gambar 4.6 Peta Penggunaan Lahan	82
Gambar 4.7 Peta Administrasi Kecamatan Suli.....	87
Gambar 4.8 Peta Lokasi Penelitian	92
Gambar 4.8 Peta Konsep Perencanaan Aspek Bangunan	116
Gambar 4.9 Peta Konsep Perencanaan Aspek Jaringan	117
Gambar 4.10 Peta Konsep Perencanaan Aspek Air Bersih.....	118
Gambar 4.11 Peta Konsep Perencanaan Aspek Drainase	119
Gambar 4.12 Peta Konsep Perencanaan Aspek Air Limbah	120
Gambar 4.13 Peta Konsep Perencanaan Aspek Persampahan	121
Gambar 4.14 Peta Konsep Perencanaan Aspek Proteksi Kebakaran	122
Gambar 4.15 Peta Konsep Perencanaan Aspek Proteksi Kebakaran	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Upaya penanganan permukiman kumuh telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman, yang di tuangkan dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh yang menyatakan bahwa untuk mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keandalan bangunan, suatu lingkungan permukiman yang tidak sesuai tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi, kualitas bangunan sangat rendah, prasarana lingkungan tidak memenuhi syarat dan rawan akan bahaya kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Luwu, maka kebutuhan penyediaan akan prasarana dan sarana permukiman meningkat pula, baik melalui peningkatan maupun pembangunan baru. Selanjutnya pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah, sehingga kapasitas

daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang ada mulai menurun yang pada gilirannya memberikan kontribusi terjadinya lingkungan permukiman kumuh. Lingkungan permukiman kumuh digambarkan sebagai bagian yang terabaikan dari lingkungan perkotaan dimana kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya sangat memprihatinkan, yang diantaranya ditunjukkan dengan kondisi lingkungan hunian yang tidak layak huni, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sarana dan prasarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat, tidak tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan maupun sarana dan prasarana sosial budaya kemasyarakatan yang memadai, kekumuhan lingkungan permukiman cenderung bersifat paradoks, bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut, kekumuhan dalam kenyataan sehari-hari tidak mereka masalahkan, sedangkan di pihak banyak berkeinginan untuk menanganinya. Sehingga masalah kumuh menjadi suatu permasalahan yang perlu segera ditanggulangi penanganannya.

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan di Kabupaten Luwu yang menjadi polemik, karena upaya penanganan yang sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan kumuh dan munculnya kawasan-kawasan kumuh baru. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap

penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Di lain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat. Selain itu, permasalahan permukiman kumuh di Kabupaten Luwu, secara umum kerap kali berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya, sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti munculnya kantung-kantung permukiman pada lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (*squatters*), tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan dan sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat standar pelayanan minimal (SPM) perkotaan.

Salah satu desa di Kecamatan Suli yaitu Kawasan Cimpu patut menjadi perhatian. Dikarenakan banyaknya kondisi rumah penduduk yang merupakan bangunan yang tidak permanen, banyaknya jalan yang tidak diperkeras dan mengalami kerusakan. Selain itu sulitnya air bersih dan saluran air yang tidak teratur, pembuangan sampah/kotoran sembarangan akibat perilaku warga yang tidak mempertimbangkan

kebersihan maupun kesehatan dengan membuang air limbah rumah tangga di sungai mengakibatkan sampah yang menumpuk dan bau kotor/jorok tak terbandung lagi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kondisi bagaimana tingkat kekumuhan di Kawasan Cimpu dan menyusun konsep pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah merupakan salah satu poin terpenting yang perlu dirumuskan oleh peneliti dalam proses penelitian. Adapun berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana tingkat kekumuhan di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana konsep pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam studi ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat kekumuhan Di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

2. Untuk merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini yaitu dijelaskan sebagai berikut:

1. Bidang Akademik

Penelitian ini bermanfaat untuk semakin memperdalam pemahaman tentang hubungan perencanaan wilayah dan kota dengan Konsep Pencegahan Dan Peningkatan Permukiman Kumuh tersebut sesuai dengan perspektif ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK).

2. Instansi Pemerintah

Bagi instansi pemerintah (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam Konsep Pencegahan Dan Peningkatan Permukiman Kumuh Di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

3. Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan edukasi tentang Konsep Pencegahan Dan

Peningkatan Permukiman Kumuh Di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pada penelitian kali ini adalah difokuskan pada kawasan Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

2. Ruang Lingkup Materi

Lingkup Materi pada penulisan ini difokuskan pada konsep pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih memudahkan penulisan ini secara sistematis, maka diuraikan dalam bentuk sistematika penulisan yang secara garis besar menguraikan bab dan sub bab dalam penulisan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini membahas tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini membahas tentang tinjauan terhadap literatur dan landasan teori yang berkaitan dengan

tujuan penelitian yang digunakan sebagai dasar pemahaman penulis guna mencapai tujuan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini berisi tentang metode dalam melakukan penelitian berupa lokasi penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik dalam menganalisis data, populasi dan sampel, jenis dan sumber data serta kerangka pemikiran dalam proses penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, Pada bagian ini akan diuraikan mengenai gambaran umum Kabupaten Luwu, gambaran umum Kecamatan Suli dan spesifikasi lokasi penelitian, beserta hasil analisis mengenai konsep pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh.

BAB V PENUTUP, Pada bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut (Abrams, 1964:7).

Perumahan dapat diartikan sebagai suatu cerminan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya dan dapat juga mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya, masyarakat ataupun suatu bangsa (Yudohusodo, 1991:1).

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan permukiman adalah dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dan berkaitan erat dengan aktifitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan daerah. Permukiman adalah perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada di dalamnya. Berarti permukiman memiliki arti lebih luas dari pada perumahan yang hanya merupakan

wadah fisiknya saja, sedangkan permukiman merupakan perpaduan antara wadah (alam, lingkungan, dan jaringan) dan isinya (manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya di dalamnya) (Kuswartojo, 1997:21).

Permukiman merupakan bentuk tatanan kehidupan yang di dalamnya mengandung unsur fisik dalam arti permukiman merupakan wadah aktifitas tempat bertemunya komunitas untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat (Niracanti, 2001:51).

Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Pengertian rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
2. Yang dimaksud dengan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai

prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan.

Seperti kebanyakan wajah permukiman di Indonesia banyak kita jumpai permukiman penduduk yang sering disebut kampung. Adapun pengertian kampung identik dengan suatu wilayah yang terdapat di pedesaan dan berada pada kondisi yang terpenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan sarana dan prasarana yang layak. Kampung merupakan lingkungan suatu masyarakat yang sudah mapan, yang terdiri dari golongan berpenghasilan rendah dan menengah dan pada umumnya tidak memiliki prasarana, utilitas dan fasilitas sosial yang cukup baik jumlah maupun kualitasnya dan dibangun di atas tanah yang telah dimiliki, disewa atau dipinjam pemiliknya.

B. PERSYARATAN PERMUKIMAN

Permukiman pada garis besarnya terdiri dari berbagai komponen yaitu: Pertama, adalah lahan atau tanah yang diperuntukan untuk permukiman itu dimana kondisi tanah akan mempengaruhi harga dari satuan rumah yang dibangun atas lahan tersebut. Kedua, prasarana permukiman yaitu jalan lokal, saluran drainase, saluran air kotor, saluran air bersih, serta jaringan telepon dan listrik. Komponen ketiga adalah perumahan (tempat tinggal) yang dibangun. Suatu permukiman akan menjadi ideal apabila telah memiliki komponen yang keempat, yaitu fasilitas umum dan *social* (kadang disebut fasilitas kota) yaitu fasilitas

pendidikan, kesehatan, peribadatan, lapangan bermain, dan lainnya (Sinulingga, 2005). Secara sederhana, Sinulingga (2005) menyatakan bahwa suatu permukiman yang baik itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Lokasinya sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh kegiatan lain seperti pabrik yang menyebabkan pencemaran udara, lingkungan, atau pencemaran lainnya.
2. Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan dan perdagangan.
3. Mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air walaupun hujan yang lebat sekalipun.
4. Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang siap disalurkan ke masing-masing rumah.
5. Dilengkapi dengan fasilitas pembuangan air kotor/tinja.
6. Dilengkapi dengan fasilitas umum seperti taman bermain bagi anak-anak, lapangan atau taman, tempat beribadat, pendidikan kesehatan.
7. Adanya fasilitas pembuangan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman.
8. Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon.

C. ELEMEN DASAR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Permukiman terbentuk atas kesatuan antara manusia dan lingkungan disekitarnya. Permukiman merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa elemen yaitu (Sastra dan Marlina 2006:39):

1. Alam

Alam yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah dan difungsikan semaksimal mungkin.

2. Manusia

Di dalam suatu wilayah permukiman, manusia merupakan pelaku utama kehidupan, disamping makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan dan lainnya. sebagai makhluk yang paling sempurna, dalam kehidupannya manusia membutuhkan berbagai hal yang dapat menunjang kelangsungan hidupnya, baik itu kebutuhan biologis (ruang, udara, temperatur, dan lainlain), perasaan dan persepsi, kebutuhan emosional dan kebutuhan akan nilai-nilai moral.

3. Masyarakat

Masyarakat merupakan kesatuan kelompok orang (keluarga) dalam suatu permukiman yang membentuk suatu komunitas tertentu. Hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang mendiami suatu wilayah permukiman adalah:

a. Kepadatan dan komposisi penduduk

- b. Kelompok sosial
 - c. Adat dan kebudayaan
 - d. Pengembangan ekonomi
 - e. Pendidikan
 - f. Kesehatan
 - g. Hukum dan administrasi
4. Bangunan atau rumah

Bangunan atau rumah merupakan wadah bagi manusia. Pada prinsipnya bangunan yang dapat digunakan sepanjang operasional kehidupan manusia bisa dikategorikan sesuai dengan fungsi masing-masing, yaitu:

- a. Rumah pelayanan masyarakat (sekolah, rumah sakit, dan lain-lain)
 - b. Fasilitas rekreasi atau hiburan
 - c. Pusat perbelanjaan
 - d. Industri
 - e. Pusat transportasi
5. *Networks*

Networks merupakan sistem buatan maupun alami yang menyediakan fasilitas untuk operasional suatu wilayah permukiman. Untuk sistem buatan, tingkat pemenuhannya bersifat relatif, dimana antara wilayah permukiman satu dengan yang lainnya tidak sama.

Sistem buatan yang keberadaannya diperlukan dalam suatu wilayah antara lain:

- a. Sistem jaringan air bersih
- b. Sistem jaringan listrik
- c. Sistem transportasi
- d. Sistem komunikasi
- e. Drainase dan air kotor
- f. Tata letak fisik

Adapun elemen dasar lingkungan perumahan dan permukiman menurut Permen PUPR no. 2 tahun 2016 yaitu:

1. Kondisi bangunan gedung
2. Kondisi jalan lingkungan
3. Kondisi penyediaan air minum
4. Kondisi drainase lingkungan
5. Kondisi pengelolaan air limbah
6. Kondisi pengelolaan persampahan
7. Kondisi proteksi kebakaran .

D. FAKTOR PENYEBAB TUMBUHNYA KAWASAN PERMUKIMAN

Dalam perkembangannya permukiman di pusat kota disebabkan oleh beberapa faktor Menurut Contantinos Apostolou Doxiadis (1968), disebutkan bahwa perkembangan permukiman (*Development of Human Settlement*) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. *Growth of Density* (Pertumbuhan Jumlah Penduduk)

Dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan adanya pertumbuhan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan demikian semakin bertambahlah jumlah hunian yang ada di kawasan permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan permukiman.

2. *Urbanization* (urbanisasi)

Dengan adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanis yang bekerja di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja memilih untuk tinggal di permukiman di sekitar keasetan pusat kota (*down town*). Hal ini juga akan menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota. Menurut Komarudin (1997), kita harus akui pula tumbuhnya permukiman-permukiman spontan dan permukiman kumuh adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses urbanisasi.

E. PERMUKIMAN KUMUH

Kawasan permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata

ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya (Budiharjo, 1997).

Menurut Sinulingga (2005) permukiman kumuh adalah lingkungan hunian atau tempat tinggal/rumah beserta lingkungannya, yang berfungsi sebagai rumah tinggal dan sebagai sarana pembinaan keluarga, tetapi tidak layak huni ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk, sarana dan prasarananya, fasilitas pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana sosial budaya masyarakat.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakaturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (UU Perumahan dan Kawasan Permukiman No.1 Tahun 2011).

Pengertian permukiman kumuh hingga kini beragam, hal ini dikarenakan perbedaan sudut pandang para ahli menilai atau mendefinisikan permukiman kumuh.

1. Definisi permukiman kumuh menurut Komarudin (1997), lingkungan permukiman kumuh dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Lingkungan permukiman yang berpenghuni padat (melebihi 500 orang per Ha) .
- b. Kondisi sosial ekonomi rendah
- c. Jumlah rumah yang sangat padat
- d. Ukurannya di bawah standar
- e. Prasarana lingkungan hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan
- f. Dibangun di atas tanah negara atau tanah milik orang lain dan di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menurut Silas (1996) adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan rumah pada permukiman kumuh terpaksa dibawah standar, rata-rata 6 m²/orang. Sedangkan fasilitas kota secara langsung tidak terlayani karena tidak tersedia. Namun karena lokasinya dekat dengan permukiman yang ada, maka fasilitas lingkungan tersebut tidak sulit mendapatkannya.
- b. Permukiman ini secara fisik memberikan manfaat pokok, yaitu dekat tempat mencari nafkah (*opportunity value*) dan harga rumah juga murah (asas keterjangkauan) baik membeli atau menyewa.
- c. Manfaat permukiman disamping pertimbangan lapangan kerja dan harga murah adalah kesempatan mendapatkannya atau aksesibilitas tinggi.

3. Menurut Parsudi Suparlan (1993) adalah:

- a. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
- b. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruang-ruangan yang mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
- c. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemerawutan tata ruang dan ketidak berdayaan ekonomi penghuninya.

F. FAKTOR PENYEBAB TUMBUHNYA PERMUKIMAN KUMUH

Seiring dengan pertumbuhan kehidupan manusia baik ekonomi, sosial maupun budaya maka manusia berkeinginan untuk memiliki kehidupan dan status yang lebih baik yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan, seperti gaya hidup dan bentuk hunian yang mereka tinggali.

Menurut Constantinos Apostolou Doxiadis (1968), pertumbuhan berarti pula berubah baik bentuk dan ukurannya. Tidak dimungkinkan pertumbuhan ukuran dengan tidak menyebabkan perubahan bentuk fisiknya. Dengan bertambahnya jumlah penghuni rumah dan dengan bertambahnya penghasilan mereka membuat ruang-ruang baru. Perubahan hunian ini akan merubah wajah suatu hunian. Hal ini akan

berpengaruh pada penyediaan fasilitas prasarana sarana lingkungan yang harus bertambah juga jika jumlah permukiman bertambah.

Selain hal tersebut di atas, faktor kemiskinan juga sangat berpengaruh pada kualitas fisik permukiman. Karena dana yang terbatas dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, maka masyarakat kurang mampu tidak dapat memperbaiki maupun memelihara bangunan rumah hunian mereka. Yang akan berakibat pada kekumuhan permukiman.

Menurut Constantinos Apostolou Doxiadis (1968), menyebutkan bahwa mempelajari tentang kawasan Perumahan Permukiman tidak hanya mempelajari area terbangun dan area terbuka saja tetapi juga fungsi dari kawasan tersebut. Oleh karenanya dalam mempelajari tentang perumahan permukiman atau fungsinya, kita juga harus mengetahui hubungan kawasan tersebut dengan lingkungan sekitar di luar kawasan tersebut dan mengetahui jalur transportasi yang menghubungkan kawasan tersebut dengan kawasan lainnya. Karena aktifitas disekitar kawasan permukiman juga sangat mempengaruhi fungsi dari permukiman.

Faktor penyebab tumbuhnya permukiman kumuh menurut beberapa pakar:

1. Menurut Yudohusodo (1991), faktor tumbuhnya permukiman kumuh:

- a. Arus urbanisasi penduduk yang pesat terutama di kota-kota besar berdampak terhadap timbulnya ledakan jumlah penduduk.
 - b. Sektor informal merupakan bidang pekerjaan tanpa penghasilan yang tetap. Bidang pekerjaan ini muncul karena pengaruh desakan ekonomi yang tidak didukung oleh keahlian yang memadai.
 - c. Kondisi sosial budaya masyarakat juga menjadi pemicu terbentuknya kawasan permukiman kumuh, yang dimaksud disini menyangkut pola hidup atau kebiasaan masyarakat yang masih terbawa iramanya kehidupan kota.
2. Menurut Khomaruddin (1997), penyebab utama tumbuhnya permukiman kumuh adalah sebagai berikut:
- a. Urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah,
 - b. Sulit mencari pekerjaan,
 - c. Sulitnya mencicil atau menyewa rumah,
 - d. Kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan,
 - e. Perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh pemilik rumah serta disiplin warga rendah,
 - f. Semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah.

3. Menurut Suud & Navitas (2015) yang menyebabkan terjadinya permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- a. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi
- b. Kepadatan penduduk yang tinggi
- c. Kondisi pelayanan air bersih yang belum merata dalam menjangkau masyarakat
- d. Kondisi sanitasi lingkungan yang tidak layak
- e. Kondisi fasilitas persampahan yang buruk
- f. Kondisi jalan yang buruk baik dari segi perkerasan maupun lebar jalan
- g. Keterbatasan ruang terbuka
- h. Jenis pekerjaan informal dengan pendapatan rendah
- i. Tingkat pendidikan yang rendah
- j. Keterbatasan lahan permukiman

G. INDIKATOR PERMUKIMAN KUMUH

Identifikasi permasalahan kekumuhan merupakan tahap identifikasi untuk menentukan permasalahan kekumuhan pada obyek kajian yang difokuskan pada aspek kualitas fisik bangunan dan infrastruktur keciptakaryaannya pada suatu lokasi. Identifikasi permasalahan kekumuhan dilakukan berdasarkan pertimbangan pengertian perumahan kumuh dan permukiman kumuh, persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku, serta standar pelayanan minimal

yang dipersyaratkan secara nasional berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut : (Permen PUPR no. 2 tahun 2016).

- a. Kondisi bangunan gedung
- b. Kondisi jalan lingkungan
- c. Kondisi drainase lingkungan
- d. Kondisi penyediaan air minum
- e. Kondisi pengelolaan air limbah
- f. Kondisi pengelolaan persampahan
- g. Kondisi pengamanan kebakaran



BOSOWA

Tabel 2.1. Kriteria dan Penilaian Tingkat Kekumuhan

No.	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
1	2	3	4	5	6
1.	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5
				51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3
				25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan	Bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan (luas lantai > 7,2 m ² per orang)	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5
				51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3
				25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dampak lingkungan • Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum • Keselamatan bangunan gedung • Kenyamanan bangunan gedung • Kemudahan bangunan gedung 	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5
				51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3
				25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1

No.	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
1	2	3	4	5	6
2.	Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis struktur beton, aspal, maupun paving.	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5
				51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3
				25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1
		b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5
				51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3
				25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5
				51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3
				25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1

No.	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
1	2	3	4	5	6
		b. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5
				51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3
				25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1
4.	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidak mampuan mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5
				51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3
				25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1
		b. Ketidakterediaan Drainase	Tidak ada drainase sehingga menimbulkan genangan air kotor.	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5
				51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3
				25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1

No.	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
1	2	3	4	5	6
		c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Kondisi drainase tidak mengalir ke sistem drainase kota, karena penimbunan tanah, sampah maupun karena telah terjadi kerusakan.	76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5
				51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3
				25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1
		d. Tidak Terpeliharanya Drainase	Kondisi drainase buruk, karena penimbunan tanah, sampah maupun karena telah terjadi kerusakan.	76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	5
				51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	3
				25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	1
		e. Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5
				51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3
				25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1

No.	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
1	2	3	4	5	6
5.	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5
				51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3
				25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: • Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5
				51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3
				25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1
6.	Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: • Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; • Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5
				51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3

No.	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
1	2	3	4	5	6
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	lingkungan; • Grobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan	25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1
			• Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5
				51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3
			25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1	
		c. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	5	
			51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	3	
			25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	1	
			76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5	
7.	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: • Jalan lingkungan • Bangunan pos kebakaran	51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3

No.	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> Bangunan pendukung lainnya 	25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1
		b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Pasokan air; Sarana komunikasi Data sistem proteksi kebakaran lingkungan Alat pemadam api ringan (APAR) Mobil pompa Peralatan pendukung lainnya 	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5
				51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3
				25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1

Sumber : Permen PU No. 2 Tahun 2016

H. TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh terdiri dari:

1. di atas air;
2. di tepi air;
3. di dataran rendah;
4. di perbukitan; dan
5. di daerah rawan bencana.

Tabel 2.2. Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

No.	Tipologi	Lokasi
1.	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.
2.	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.
3.	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.

No.	Tipologi	Lokasi
4.	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%
5.	Permukiman kumuh di daerah rawan bencana	Permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

Sumber : Permen PU No,12 Tahun 2016

I. KONSEP PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi permukiman. Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah diamanatkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun konsep penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut.

1. Pencegahan

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh mencakup:

- a. Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;

- b. Ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- c. Penurunan kualitas rumah, perumahan dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
- d. Pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. Pengawasan dan Pengendalian

Dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- b. Pemberdayaan Masyarakat

Dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

2. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi permukiman kumuh dengan pola penanganan sebagai berikut;

- a. Pemugaran

Pemugaran merupakan upaya perbaikan atau dapat pula dilakukan melalui pembangunan kembali kawasan permukiman agar menjadi layak huni;

b. Peremajaan

Merupakan upaya untuk meujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang terkena dampak.

Peremajaan harus menghasilkan rumah, perumahan, dan permukiman dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya;

c. Permukiman Kembali

Dilakukan apabila lokasi kumuh eksisting adalah lokasi yang tidak diperuntukkan bagi kawasan permukiman menurut RTR atau merupakan lokasi yang rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mendiami kawasan/lokasi tersebut. Permukiman kembali merupakan upaya memindahkan masyarakat dari lokasi eksisting yang dilakukan oleh dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang juga menetapkan lokasi untuk permukiman kembali dengan turut melibatkan peran masyarakat..

Pola-pola penanganan tersebut dilakukan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat. Pola-pola penanganan peningkatan

kualitas terhadap permukiman kumuh direncanakan dengan mempertimbangkan (Permen PUPR no. 2 tahun 2016) :

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;
- f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

J. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan dan menjadi referensi sebagai metode teori dalam melakukan penelitian ini.

Tabel 2.3. Sumber Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	Darianto Bangun, Sekolah Pasca Sarjana PWD USU	2005	Permukiman Kumuh dan Permasalahannya serta Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Wilayah Kota.	Metodologi analisis deskriptif. Metode Pengumpulan data: primer dan sekunder.	Permukiman kumuh tumbuh akibat; tidak terpeliharanya sarana prasarana yang ada serta bangunan tanpa perencanaan, akibat migrasi dan urban bias perkotaan serta tuntutan pekerjaan.

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
2.	Enny Endang Surtiani, Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro	2006	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus : Kawasan Pancuran, Salatiga).	Metodologi penggabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode Pengumpulan data: primer dan sekunder.	Faktor yang menyebabkan kawasan Pancuran menjadi kumuh adalah faktor tingkat penghasilan, status kepemilikan hunian, dan lama tinggal.

3.	Endi Martha Mulia, Sekolah Pasca Sarjana PSL USU	2008	Analisis Faktorfaktor Tekanan Lingkungan pada Permukiman Kumuh (Studi Kasus : Permukiman Kampung Kubur, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah).	Metodologi analisis faktor. Metode Pengumpulan data: primer dan sekunder.	Permukiman Kampung Kubur mengalami tekanan lingkungan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dari aspek ekonomi, sosial dan budaya, serta fisik lingkungan.
----	--	------	---	---	--

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
4.	Adina Sari Lubis, Fakultas Teknik USU	2010	Kajian Karakteristik Pemukim Kumuh dan Liar di Perkotaan	Metodologi penggabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis statistik yakni analisis silang (<i>crosstab</i>). Metode Pengumpulan data: primer dan sekunder.	Karakteristik pemukim tidak terlepas dari latar belakang mereka, baik identitas diri maupun kondisi lingkungan.

5.	Jawas Dwijo Putro, Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura	2011	Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai di Kecamatan Sungai Raya.	Metodologi analisis deskriptif. Metode Pengumpulan data: primer dan sekunder.	Perumusan beberapa strategi perencanaan dalam penataan kawasan kumuh, yaitu strategi perencanaan fisik bangunan dan strategi perencanaan sarana dan prasarana.
----	--	------	---	---	--

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
6.	Waston Malau, FIS Program Studi Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan	2013	Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area) di Daerah Perkotaan.	Metodologi analisis deskriptif. Metode Pengumpulan data: primer dan sekunder.	Angka kelahiran dan urbanisasi merupakan dua faktor utama yang menyebabkan penambahan penduduk yang pesat di daerah perkotaan. Penghuni pemukiman kumuh (daerah slum) adalah sekelompok orang yang datang dari desa menuju kota dengan tujuan ingin mengubah nasib.
7.	Amos Setiadi, Magister Teknik Arsitektur	2014	Tipologi dan Pola Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Bontang.	Metode penilaian lingkungan permukiman kumuh	Pola penanganan permukiman kumuh di Kota Bontang sesuai dengan

	<p>Universitas Atma Jaya.</p>		<p>dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria.</p> <p>Metode Pengumpulan data: primer dan sekunder.</p>	<p>karakteristik lokasi dilakukan dengan pola sesuai karakter lokasi, mencakup lokasi dengan kategori Permukiman kumuh tinggi (KT) dilakukan pola penanganan kuratif (penanggulangan), lokasi dengan kategori Permukiman kumuh sedang (KS) dilakukan pola penanganan reduktif, dan lokasi dengan kategori Permukiman kumuh rendah (KR) dilakukan pola penanganan preventif (pencegahan).</p>
--	-------------------------------	--	---	--

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
8.	Dar Kasih, Sekolah Pasca Sarjana PWD USU	2016	Analisis Tingkat Kekumuhan Permukiman di Kecamatan Johan Pahlawan Dalam Pengembangan Wilayah Ibu Kota Kabupaten Aceh Barat	Analisis deskriptif dan Analisis regresi berganda. Metode Pengumpulan data: primer dan sekunder.	Tingkat kekumuhan permukiman di Kecamatan Johan Pahlawan tergolong kumuh sedang, ringan dan tidak kumuh.
9.	Chairul Abidin, Sekolah	2017	Manfaat Ketersediaan Infrastruktur	Analisis deskriptif kuantitatif.	1. Menganalisis ketersediaan infrastruktur 2. Menganalisis manfaat ketersediaan infrastruktur

	Pasca Sarjana PWD USU		Pada Kawasan Kumuh Terhadap Pengembangan Wilayah di Kecamatan Medan Belawan	Metode Pengumpulan data: primer dan sekunder.	di kawasan kumuh terhadap benefit yang diterima masyarakat.
--	-----------------------------	--	--	---	--

No.	Peneliti	Tahun	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
10.	Hasrul Rizka, Sekolah Pasca Sarjana PWD USU	2018	Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara	Analisis Deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Metode Pengumpulan data: primer dan sekunder.	Kondisi fisik permukiman kumuh perlunya perbaikan dan penataan kembali, hasil analisis untuk tingkat kekumuhan adalah kekumuhan sedang, dan hasil analisis untuk perencanaan penanganan adalah model program perbaikan kampung (KIP) dan model konsolidasi lahan (<i>Land Consolidation</i>).

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

BAB III

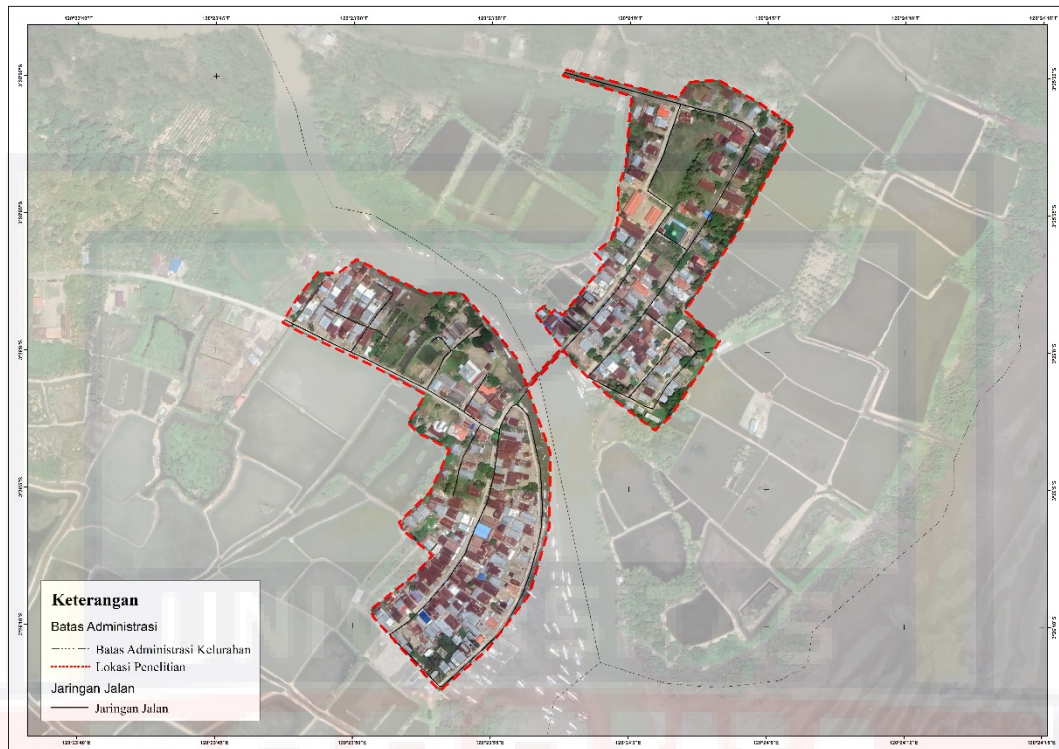
METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *mix methods*, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif (Cresswell, 2010). Sedangkan menurut Sugiyono (2016) *mix methods* adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif.

B. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah kawasan yang menjadi objek penelitian dari Konsep Pencegahan Dan Peningkatan Perumahan Dan Permukiman Kumuh yakni di Kawasan Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.



Gambar 3.1. Peta Lokasi Penelitian
(Sumber: Hasil Olahan GIS)

C. WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 4 (empat) bulan terhitung Maret 2022 sampai dengan Juni 2022.

D. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: Subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bisa berupa manusia, tumbuhan, hewan, produk, bahkan

dokumen. Jadi, populasi bukan hanya berupa manusia (Etta, Sopiah, 2010).

Dalam penelitian ini, jumlah populasi diketahui secara pasti jumlahnya (*finite population*), yaitu penelitian menggunakan populasi unit hunian pada Kawasan Permukiman Cimpu, dengan jumlah populasi unit hunian sebanyak 297 unit bangunan.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2016) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability* dengan teknik *simple random sampling*. Teknik *simple random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi yaitu jumlah kepala keluarga pada kawasan sebanyak 297 Kepala Keluarga dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin menurut Sugiyono (2016).

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir; e = 10% atau 0.1

Berdasarkan perhitungan menggunakan Rumus Slovin menunjukkan bahwa total sampel penelitian sebanyak 74,8 atau dibulatkan menjadi 75 rumah.

E. JENIS DAN SUMBER DATA

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan penelitian ini, maka jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer.

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan tanpa ada perantara antara peneliti dengan objek yang akan diteliti.

Data primer yang di ambil di lokasi penelitian yakni kondisi terkini yaitu 7 aspek kumuh:

- a. Kondisi Bangunan
- b. Kondisi Jalan
- c. Kondisi Penyediaan Air Minum
- d. Kondisi Drainase lingkungan

- e. Kondisi pengelolaan air limbah
- f. Kondisi pengelolaan Persampahan
- g. Kondisi Proteksi Kebakaran

2. Data Sekunder.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi menyangkut penelitian ini yang didapatkan dari berbagai instansi terkait seperti data jumlah penduduk, data aspek fisik dasar meliputi: topografi, kemiringan lereng, penggunaan lahan, jenis tanah, curah hujan dan lain sebagainya yang di dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data status lahan.

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Proses observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian. Kegiatan ini direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikendalikan keandalannya (reliabilitas) dan kesahihannya (validitas). Adapun objek-objek yang akan diobservasi dilapangan adalah semua objek

yang berkaitan dengan variabel yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang curah hujan, topografi, jenis tanah, kemiringan lereng dan penggunaan lahan, semua variabel yang ada dalam penelitian ini juga harus di observasi guna bisa secara langsung diamati terkait dengan bagaimana hubungan/pengaruh setiap indikator terhadap permasalahan permukiman kumuh yang terjadi di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu). Dalam metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkandata tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian. (Lexy J Moleong, 1991) Wawancara dilakukan kepada masyarakat yang tinggal di Kawasan Cimpu, kecamatan Suli, Kabupaten luwu.

3. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan merupakan teori-teori relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel serta sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara (hipotesis) dimana teori-teori yang digunakan sudah diuji kebenarannya. Dalam kajian

kepastakaan dimuat uraian penelitian terdahulu yang relevan untuk aspek-aspek penelitian yang akan dilakukan.

G. VARIABEL PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2016) “Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus penelitian untuk diamati.” Berdasarkan pendapat ahli tersebut maka yang menjadi fokus variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Kekumuhan (Y)
- b. Kondisi Bangunan (X_1)
- c. Kondisi Jalan (X_2)
- d. Kondisi Penyediaan Air Minum (X_3)
- e. Kondisi Drainase lingkungan (X_4)
- f. Kondisi pengelolaan air limbah (X_5)
- g. Kondisi pengelolaan Persampahan (X_6)
- h. Kondisi Proteksi Kebakaran (X_7)
- i. Status Kepemilikan Lahan (X_8)

H. METODE ANALISIS

Metode analisis data dalam penelitian kali yaitu :

1. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab seberapa besar tingkat kekumuhan permukiman di Kawasan Cimpu yaitu analisis skoring baseline. Adapun tingkat kekumuhan diukur berdasarkan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 ada 3 (tiga) yaitu:

- a. Tingkat kekumuhan ringan yaitu interval antara 19-44;
- b. Tingkat kekumuhan sedang yaitu interval antara 45-70; dan
- c. Tingkat kekumuhan berat yaitu interval antara 71-95.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kekumuhan yang terjadi di Kawasan Cimpu Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu terlebih dahulu kita harus mengidentifikasi terhadap 7 (tujuh) aspek kondisi fisik yang membuat kawasan tersebut menjadi kumuh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



BOSOWA

Tabel 3.1. Faktor/ Parameter Tingkat Kekumuhan

No.	Aspek	Kriteria	Rumus	Parameter	Nilai		
1	2	3	4	5	6		
1.	Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	$\frac{\text{Jumlah bangunan tidak teratur (unit)}}{\text{Jumlah bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5		
				51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3		
				25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1		
		b. Tingkat Kepadatan Bangunan		$\frac{\text{Jumlah bangunan dengan kepadatan tidak sesuai ketentuan (unit)}}{\text{Jumlah bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$	76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5	
					51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3	
					25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1	
		c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan			$\frac{\text{Jumlah bangunan tidak sesuai teknis (unit)}}{\text{Jumlah bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5
						51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3
						25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1
2.	Kondisi Jalan Bangunan	a. Cakupan pelayanan jalan lingkungan	$\frac{\text{Jumlah kawasan yang tidak terlayani jalan (ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (ha)}} \times 100\%$			76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5
						51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3

No.	Aspek	Kriteria	Rumus	Parameter	Nilai	
1	2	3	4	5	6	
				25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
		b. Kualitas permukaan jalan lingkungan	$\frac{\text{Panjang jalan lingkungan yang rusak (m)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (ha)}} \times 100\%$	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	
				51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
				25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketidakterersediaan akses aman air minum	$\frac{\text{Jumlah KK yang tidak terakses air minum berkualitas}}{\text{Jumlah KK Keseluruhan}} \times 100\%$	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	
				51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
				25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
		b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum		$\frac{\text{Jumlah KK yang tidak terpenuhi air minum secara kuantitas}}{\text{Jumlah KK Keseluruhan}} \times 100\%$	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5
					51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3
					25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1
4.	Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	$\frac{\text{Luas kawasan yang terkena genangan (ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (ha)}} \times 100\%$		76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5
					51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3

No.	Aspek	Kriteria	Rumus	Parameter	Nilai
1	2	3	4	5	6
				25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1
		b. Ketidakterediaan drainase	$\frac{\text{Luas kawasan yang tidak terlayani sistem drainase (ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (ha)}} \times 100\%$	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	5
				51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	3
				25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	1
		c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Makro	$\frac{\text{Panjang drainase tidak terhubung ke sistem makro (m)}}{\text{Panjang drainase lingkungan keseluruhan (m)}} \times 100\%$	76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5
				51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3
				25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1
		d. Tidak terpeliharanya drainase	$\frac{\text{Panjang drainase tidak terpelihara (m)}}{\text{Panjang drainase lingkungan keseluruhan (m)}} \times 100$	76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	5
				51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	3
				25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	1
		e. Kualitas konstruksi drainase	$\frac{\text{Panjang drainase dengan kualitas buruk (m)}}{\text{Panjang drainase lingkungan keseluruhan (m)}} \times 100$	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5
				51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3

No.	Aspek	Kriteria	Rumus	Parameter	Nilai
1	2	3	4	5	6
				25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1
5.	Kondisi pengelolaan air limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	$\frac{\text{Luas kawasan dengan sistem air limbah tidak sesuai standar teknis (ha)}}{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}} \times 100$	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5
				51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3
				25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1
		b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	$\frac{\text{Luas kawasan dengan sarpras air limbah tidak sesuai standar teknis (ha)}}{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}} \times 100$	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5
				51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3
				25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1
6.	Kondisi pengelolaan persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	$\frac{\text{Luas kawasan dengan sarpras pengelolaan sampah tidak sesuai standar teknis (ha)}}{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}} \times 100$	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5
				51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3
				25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1

No.	Aspek	Kriteria	Rumus	Parameter	Nilai
1	2	3	4	5	6
		b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	$\frac{\text{Luas kawasan dengan sarpras air limbah tidak sesuai standar teknis (ha)}}{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}} \times 100$	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5
				51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3
				25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1
		c. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	$\frac{\text{Luas kawasan dengan sistem pengolahan sampah tidak terpelihara (ha)}}{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}} \times 100$	76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	5
				51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	3
				25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	1
7.	Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	$\frac{\text{Luas kawasan tidak tersedia prasarana proteksi kebakaran (ha)}}{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}} \times 100$	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5
				51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3
				25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1
		b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	$\frac{\text{Luas kawasan tidak tersedia sarana proteksi kebakaran (ha)}}{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}} \times 100$	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5
				51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3
				25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1

Sumber: Permen PUPR No, 2 Tahun 2016

2. Metode yang digunakan untuk mendapat rumusan masalah kedua yaitu, dengan melakukan penyusunan desain teknis. Tujuan penyusunan desain teknis yaitu untuk memperoleh list/daftar komponen infrastruktur prioritas yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan gambar kerja yang siap diimplementasikan dalam bentuk visualisasi 3 dimensi (3D).

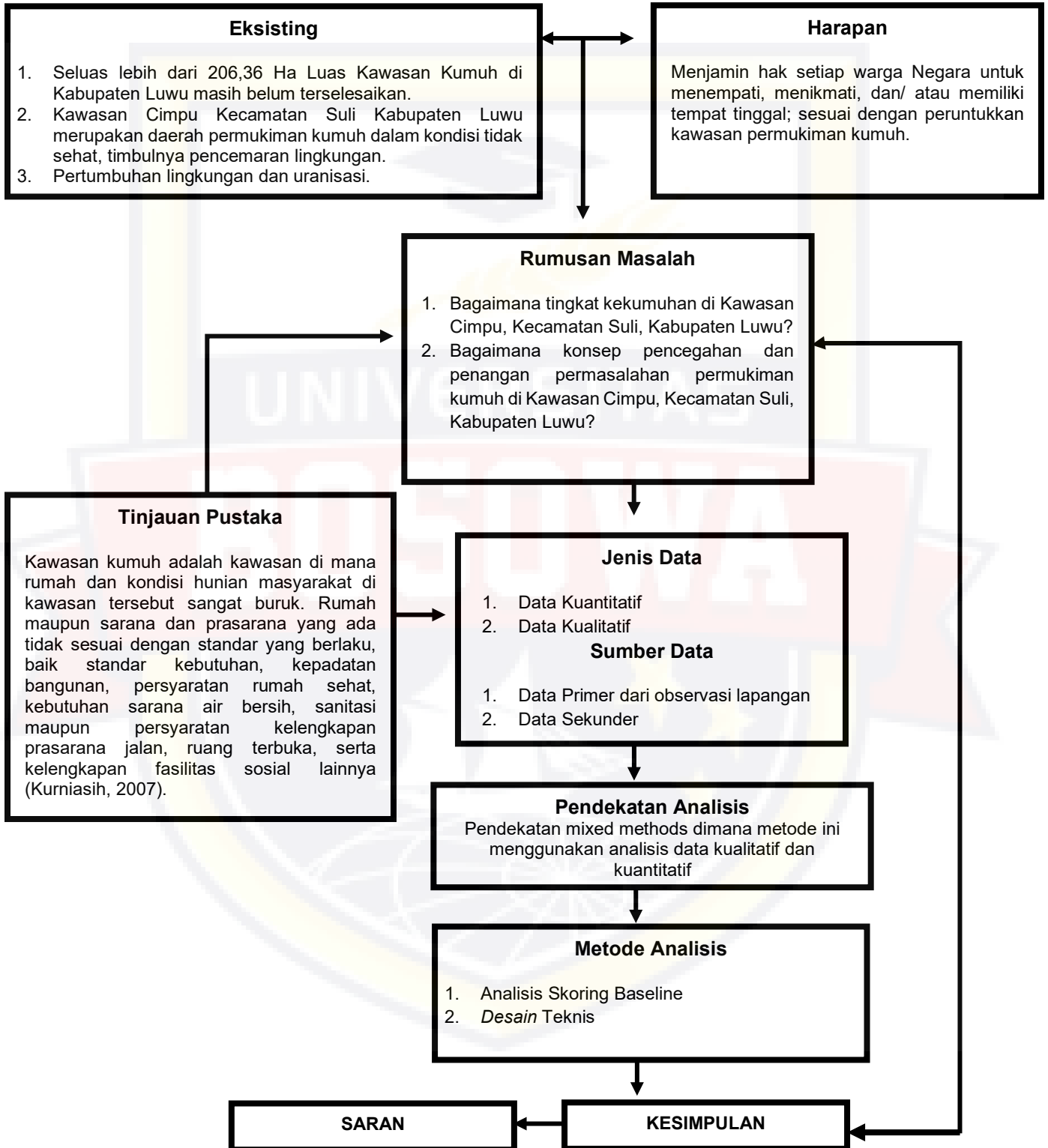
I. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional dalam penelitian ini ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok pembahasan materi penelitian untuk dijadikan acuan. Adapun diantaranya sebagai berikut:

1. Tingkat Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP).
2. Kondisi Bangunan Gedung, dalam hal ini dimaksud ialah kondisi bangunan bermukim masyarakat telah memenuhi standar kelayakan.
3. Kondisi Jalan Lingkungan, dalam hal ini dimaksud jalan yang menjadi prasarana pendukung masyarakat telah memenuhi standar lebar jalan atau ketersediaan jalan di Kawasan Cimpu.
4. Kondisi Penyediaan Air Minum, dalam hal ini dimaksud ialah masyarakat setempat telah memperoleh ketersediaan air minum yang cukup atau telah terpenuhi.

5. Kondisi Drainase Lingkungan, dalam hal ini ialah untuk mengairkan aliran pembuangan limbah ataupun air hujan yang turun di suatu wilayah terpenuhi sesuai standar.
6. Kondisi Penyediaan Air Limbah, dalam hal ini ialah pengelolaan limbah rumah tangga telah dikelola dengan baik mengarah ke pembuangan yang sesuai standar teknis.
7. Kondisi Pengelolaan Persampahan, dalam hal ini ialah pengelolaan sampah memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
8. Kondisi Proteksi Kebakaran, dalam hal ini ialah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan.
9. Status Kepemilikan Lahan, dalam hal ini adalah status kepemilikan lahan rumah yang didiami oleh anggota keluarga merupakan tanah milik sendiri, sewa, ataupun tanah pemerintah.

J. KERANGKA PIKIR



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Gambaran Umum Kabupaten Luwu

a. Letak Geografis dan Administrasi

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang dalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Pemekaran ini turut menjadikan Kota Palopo selaku pemerintahan otonom kota Palopo. Luas wilayah Kabupaten Luwu 3.000,25 km², sebelum Kota Palopo menjadi kota otonom dengan jarak tempuh dari Kota Makassar lebih dari 367 km.

Secara astronomis Kabupaten Luwu terletak antara 2°34'45" - 3°30'30' Lintang Selatan dan 120°21'15" - 121°43'11" Bujur Timur, posisi Kabupaten Luwu berada pada bagian timur laut Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara administrasi Kabupaten Luwu berbatas dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo;

Sebelah Selatan : Kota Palopo dan Kabupten Wajo;

Sebelah Timur : Teluk Bone; dan
 Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten
 Enrekang.

Kabupaten Luwu beribukota Belopa, terdiri dari 22 (dua puluh dua) kecamatan, 227 Desa/kelurahan. Adapun rincian jumlah kecamatan beserta luasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Luwu Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Presentase (%)
1	Larompong	225,25	7,51
2	Larompong Selatan	131	4,37
3	Suli	81,75	2,72
4	Suli Barat	153,5	5,12
5	Belopa	59,26	1,98
6	Kamanre	52,44	1,75
7	Belopa Utara	34,73	1,16
8	Bajo	68,52	2,28
9	Bajo Barat	66,3	2,21
10	Bassesangtempe	178,12	5,94
11	Latimojong	467,75	15,59
12	Bassesangtempe Utara	122,88	4,10
13	Bupon	182,67	6,09
14	Ponrang	107,09	3,57
15	Ponrang Selatan	99,98	3,33

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Presentase (%)
16	Bua	204,01	6,80
17	Walenrang	94,6	3,15
18	Walenrang Timur	63,65	2,12
19	Lamasi	42,2	1,41
20	Walenrang Utara	259,77	8,66
21	Walenrang Barat	247,13	8,24
22	Lamasi Timur	57,65	1,92
	Jumlah	3.000,25	100.00

Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka, Tahun 2021

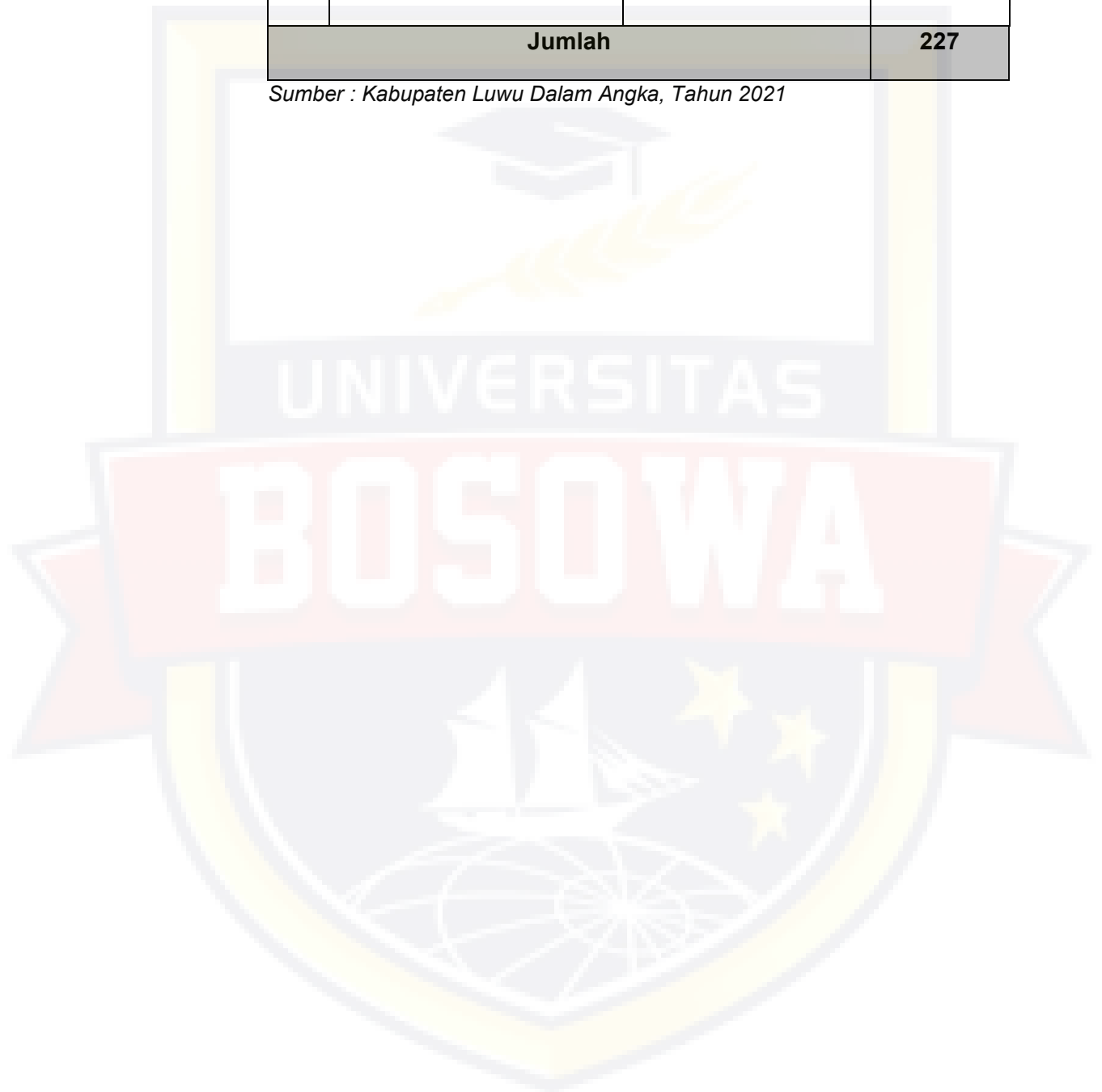
Kecamatan Latimojong kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, luas Kecamatan Latimojong tercatat sekitar 467,75 km² atau sekitar 15,59 persen dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km² dan 247,13 km² atau 8,66 persen dan 8,24 persen. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km² atau hanya sekitar 1,16 persen. Ibukota Kabupaten Luwu adalah Kecamatan Belopa. Kecamatan yang memiliki jarak terjauh ke Ibukota Kabupaten Luwu adalah kecamatan Bessesangtempe dengan jarak 110 km, kecamatan Lamasi Timur dengan jarak 96 km, dan kecamatan Walenrang Barat dengan jarak 93 km.

**Tabel 4.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten
Luwu**

No.	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Kelurahan
1	Larompong	Larompong	13
2	Larompong Selatan	Bonepute	10
3	Suli	Suli	13
4	Suli Barat	Lindajang	8
5	Belopa	Tanamanai	9
6	Kamanre	Cilallang	8
7	Belopa Utara	Pammanu	8
8	Bajo	Bajo	12
9	Bajo Barat	Bonelemo	9
10	Bassesangtempe	Lissaga	12
11	Latimojong	Pajang	12
12	Bassesangtempe Utara	Pantilang	12
13	Bupon	Noling	10
14	Ponrang	Paddang Sappa	10
15	Ponrang Selatan	Pattedong	13
16	Bua	Bua	15
17	Walentrang	Batusitanduk	9
18	Walentrang Timur	Taba	8
19	Lamasi	Lamasi	10
20	Walentrang Utara	Bosso	11
21	Walentrang Barat	Ilan Batu	6

No.	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Kelurahan
22	Lamasi Timur	To'lemo	9
Jumlah			227

Sumber : Kabupaten Luwu Dalam Angka, Tahun 2021



b. Topografi dan Kelerengan

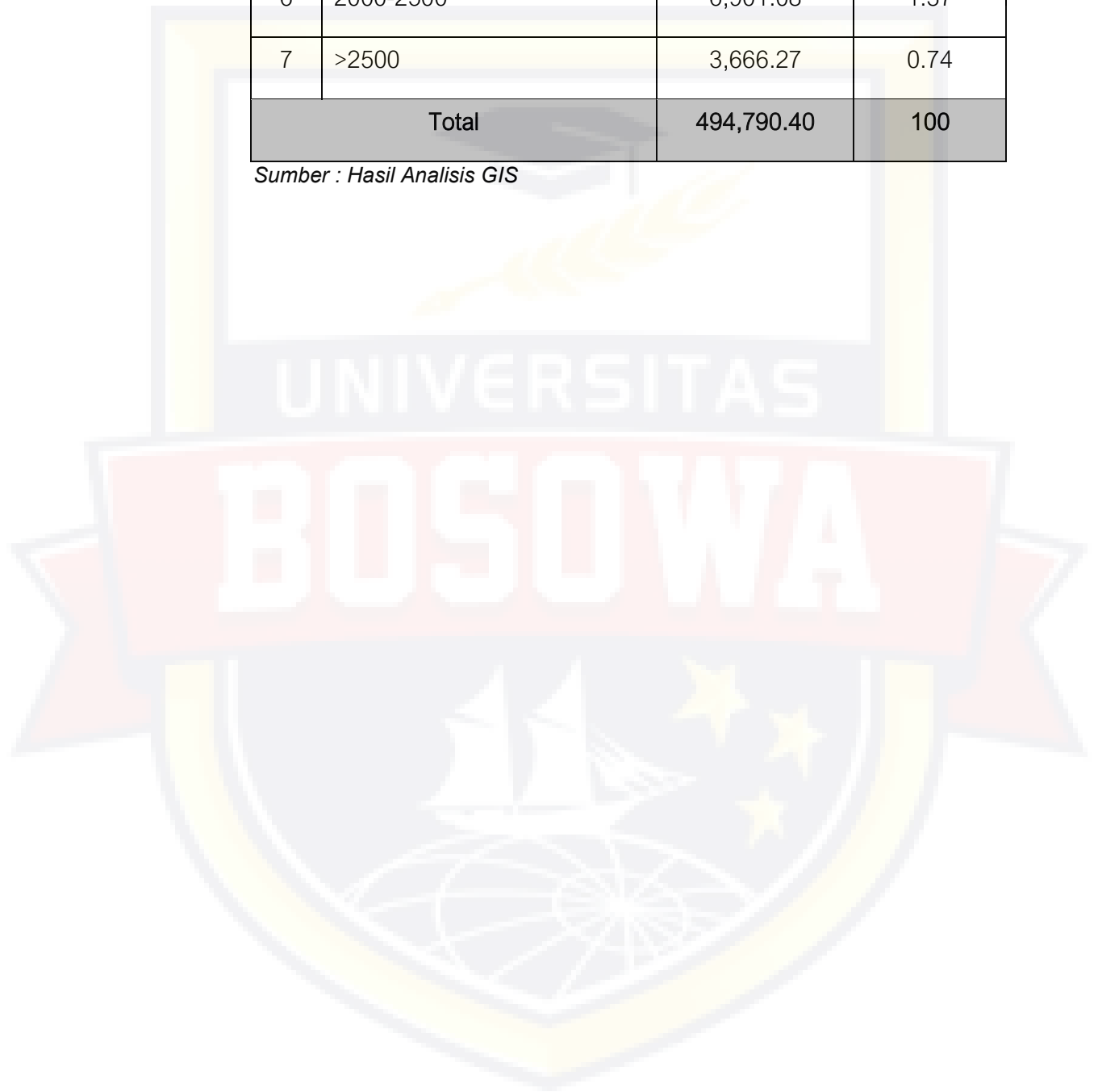
Kondisi topografi merupakan elemen yang sangat mempengaruhi dalam penentuan kesesuaian pemanfaatan lahan atau kemampuan daya dukung lahan. Dalam daerah Kabupaten Luwu kondisi topografi yang relatif bervariasi yang sebagian besar daerahnya berada pada daerah dataran rendah, di sepanjang pinggir jalan yang sudah terbentuk dengan limitasi perkembangan berupa bangunan rumah, lahan pertanian, dan kebun campuran dengan ketinggian 300-500 mdpl. Sedangkan daerah datar banyak terdapat di sekitar pesisir pantai dengan ketinggian 0-300 mdpl dan dataran tinggi terdapat di sepanjang tepian administrasi yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dengan ketinggian >2000 mdpl. Untuk Lebih Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

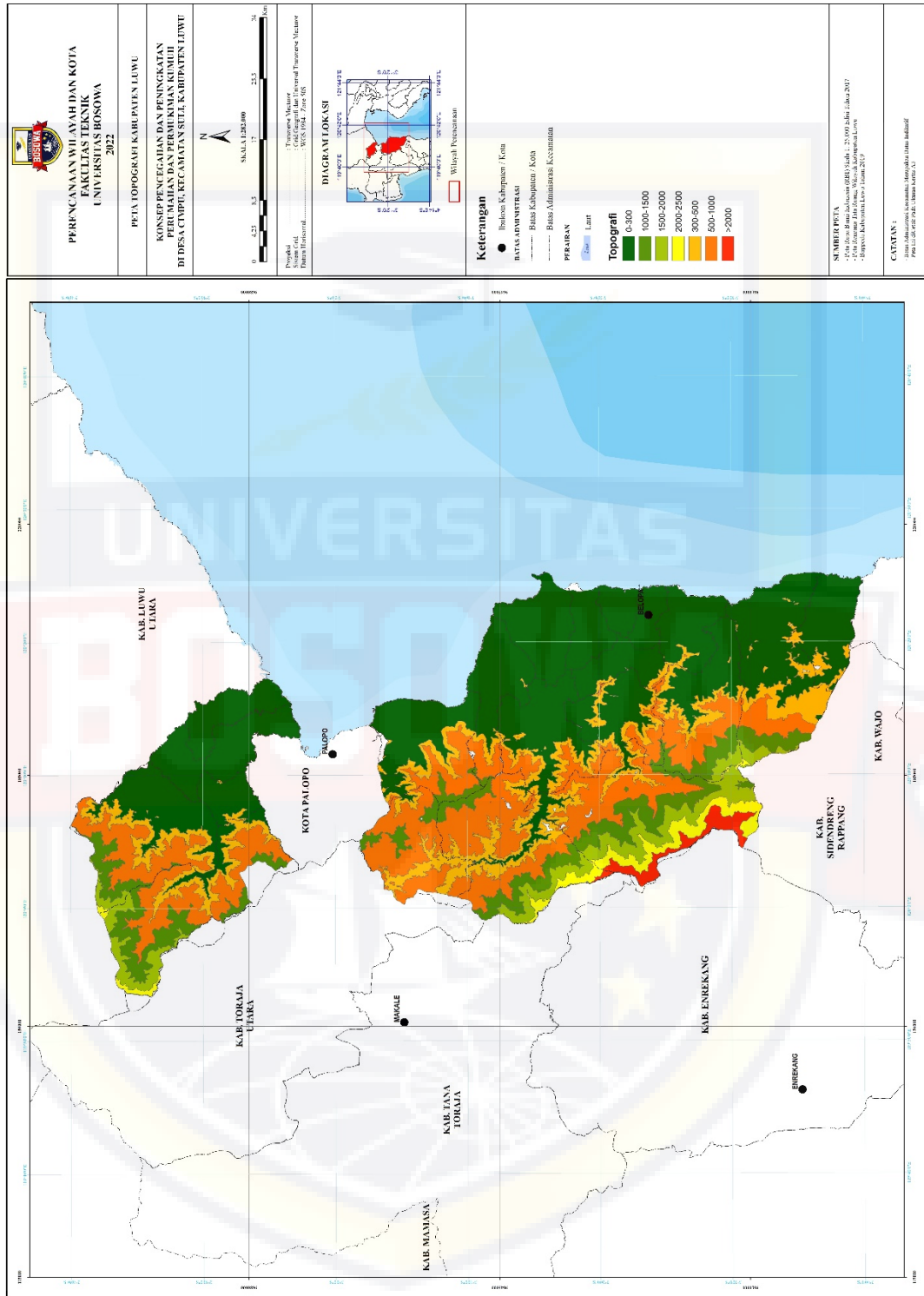
Tabel 4.3 Topografi di Kabupaten Luwu Tahun 2022

No.	Topografi (Mdpl)	Luas Lahan (Ha)	Prosentase (%)
1	0-300	236,703.99	47.84
2	300-500	138,820.00	18.44
3	500-1000	66,258.70	10.79
4	1000-1500	27,730.19	5.06
5	1500-2000	14,710.17	2.83

No.	Topografi (Mdpl)	Luas Lahan (Ha)	Prosentase (%)
6	2000-2500	6,901.08	1.37
7	>2500	3,666.27	0.74
Total		494,790.40	100

Sumber : Hasil Analisis GIS





Gambar 4.2 Peta Topografi

c. Morfologi

Morfologi merupakan bentuk permukaan bumi daratan atau bentuk bentang alam suatu tempat atau wilayah. Bentuk permukaan bumi suatu wilayah sangat ditentukan oleh ketinggian posisi tempat tersebut dari atas permukaan laut. Makin tinggi posisi suatu tempat dari permukaan laut maka bentuk permukaan alam daratannya semakin berbukit dan bergelombang.

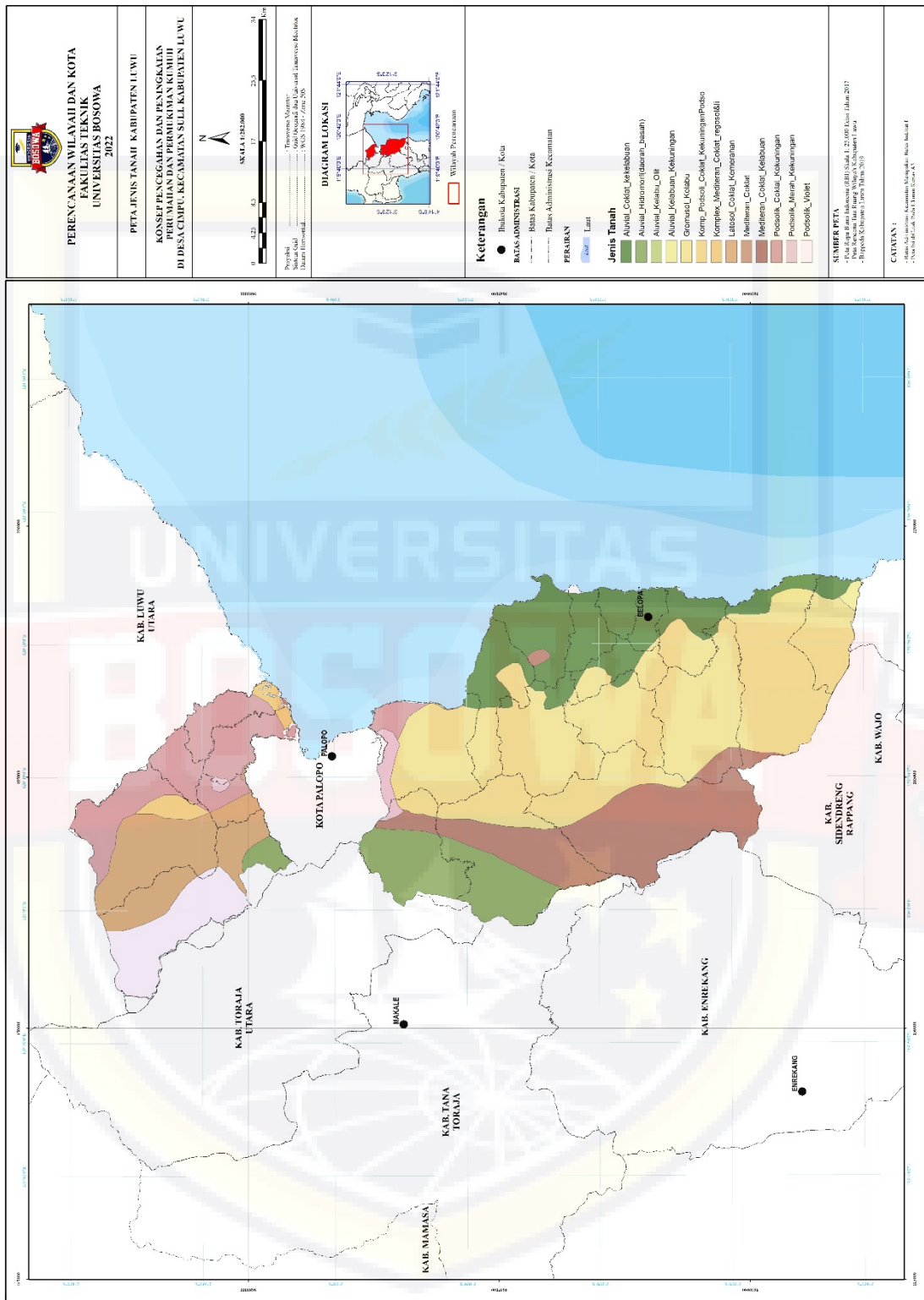
Secara umum, bentuk permukaan bumi daratan atau bentang alam di Kabupaten Luwu meliputi dataran rendah, dataran tinggi, lembah dan perbukitan. Wilayah daratan Kabupaten Luwu mempunyai ketinggian umumnya di bawah 500 meter dari permukaan laut (mdpl). Kecamatan Walenrang Barat, Kecamatan Basseangtempe, dan Kecamatan Latimojong mempunyai daerah yang mempunyai ketinggian mencapai >2500 mdpl, sedangkan kecamatan lainnya dominan tidak lebih dari 500-1000 meter di atas permukaan laut, sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk permukaan bumi dataran tinggi bukan merupakan penghambat dalam pengembangan fisik di Kabupaten Luwu.

Apabila dilihat dari keadaan morfologi Kabupaten Luwu, maka kondisi morfologi wilayah dominan dataran rendah/landai sekitar 47,84% dari luas total Kabupaten 494,790.40 Ha.

d. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Luwu bervariasi di tiap kecamatan baik yang tersebar di daerah pengunungan ataupun di daerah pesisir. Lingkup daerah pesisir cenderung memiliki bentuk tanah Datar dengan jenis tanah Aluvial Coklat kekelabuan di Kecamatan Larompong. Kecamatan Larompong juga terdapat daerah perbukitan dengan jenis tanah Gromusol Kelabu dan Mediteran Coklat Kelabuan dengan struktur bahan induk Batu Gamping & Serpih dan Batugamping. Daerah sepanjang pesisir memiliki jenis tanah yang hampir sama dari selatan Larompong hingga utara Kecamatan Bua dari garis pantai dan bagian daratan utama banyak endapan lumpur dan menjadi daerah pemanfaatan pertambakan. Permukaan tanah yang berbukit berada di ketinggian di atas 300-500 mdpl di Kecamatan Bajo Barat dengan jenis tanah Gromusol Kelabu dengan batuan induk Batu Gamping & Serpih merupakan daerah pemanfaatan perkebunan untuk komoditas unggulan Luwu yaitu Kakao.

Kondisi yang sama juga terdapat di Kecamatan latimojong dan Kecamatan Besseng Tempe yang berada di ketinggian di atas >1500 mdpl memiliki jenis tanah Mediteran Coklat Kelabuan, Grumusol Kelabu, Aluvial Hidromorf (daerah basah), Aluvial Hidromorf (daerah basah), Podsolik Merah Kekuningan.



Gambar 4.3 Peta Jenis Tanah

e. Geologi

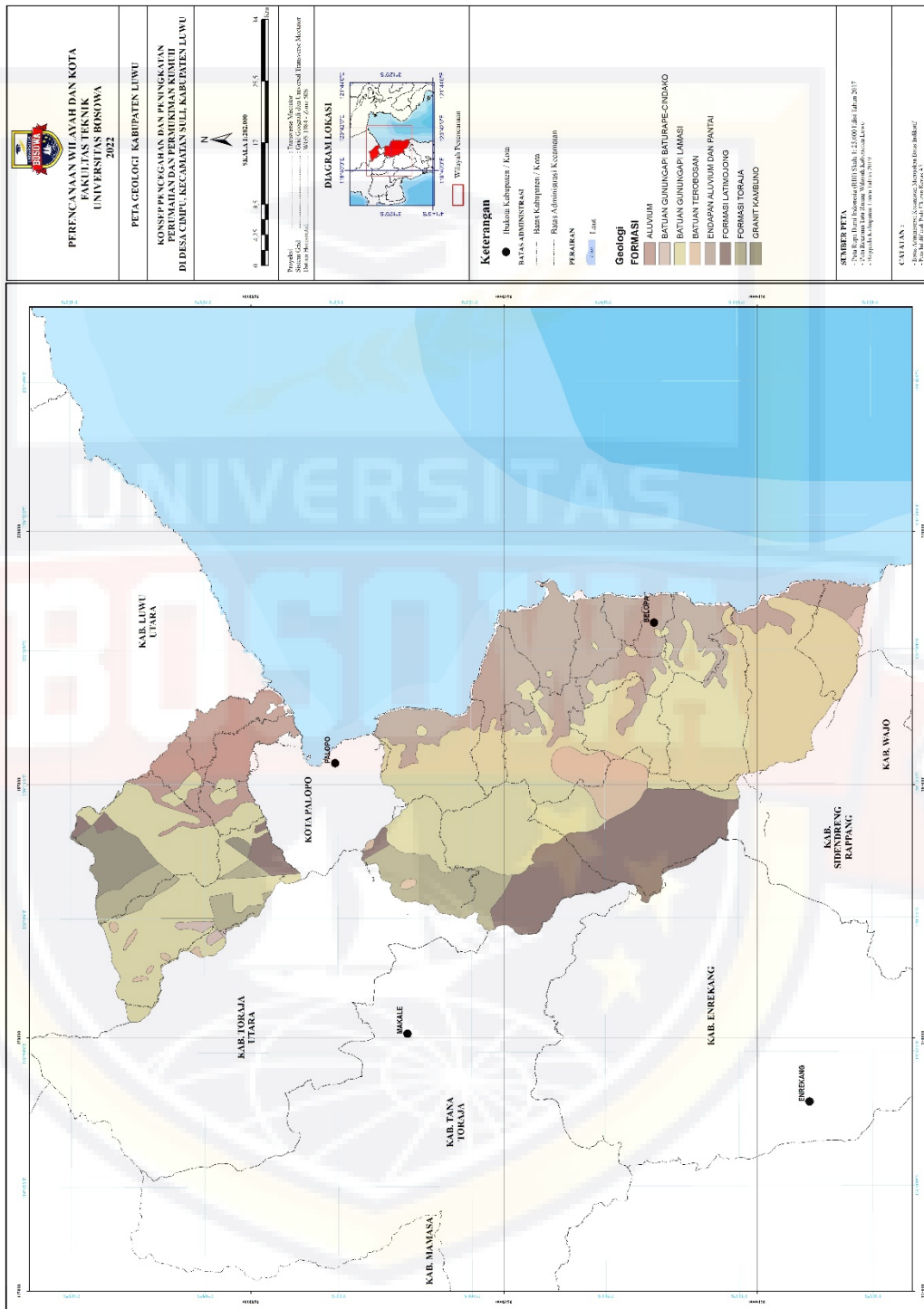
Bentuk permukaan struktur bumi di Kabupaten Luwu banyak dipengaruhi oleh pegunungan Latimojong dan Teluk Bone, jenis tanah yang terdapat yakni tanah Aluvium dengan luasan 19,437.13 ha (6.75%), Batuan Gunung Api Baturape-Cindako dengan luasan 1,494.36 ha (0.52%), Batuan Gunung Api Lamasi dengan luasan 143,686.33 ha (49.92%), Batuan Terobosan dengan luasan 9,110.93 ha (3.17%), Endapan Aluvium dan pantai dengan luasan 54,550.12 ha (18.95%), Formasi Latimojong dengan luasan 34,746.12 ha (12.07%), Formasi Toraja dengan Luasan 18,232.65 ha (6.34%), Granit Kambuno dengan luasan 6,548.75 ha (2.28%), dan total luasan lahan geologi 287,806.38 ha yang terdapat di Kabupaten Luwu. Selain tanah juga terdapat pasir, batu kali/pasir kerikil/pasir timbunan, sirtu, kalsit, dan batu gunung/batu kali. Untuk jenis galian terdapat potensi tambang emas di Kecamatan Latimojong, Walenrang Utara, Batu Gamping di Kecamatan Latimojong, Walenrang, Lamasi, Granodiorit di Kecamatan Bajo, Rijang (Chert) di Kecamatan Latimojong, Kuarsa di Kecamatan Walenrang, Batu Sabak di Kecamatan Latimojong, Bajo Barat, Andesit di Kecamatan Bajo, Basalt di Kecamatan Latimojong, Bajo, Gabro di Kecamatan Latimojong, Diorit di Kecamatan Latimojong,

Monzonit di Kecamatan Latimojong, Larompong, Besi di Kecamatan Bajo di Kecamatan Larompong Suli, Lempung di Kecamatan Bajo.

Tabel 4.4 Geologi di Kabupaten Luwu Tahun 2022

No.	Geologi	Luas Lahan (Ha)	Prosentase (%)
1	Aluvium	19,437.13	6.75
2	Batuan Gunungapi Baturape-Cindako	1,494.36	0.52
3	Batuan Gunungapi Lamasi	143,686.33	49.92
4	Batuan Terobosan	9,110.93	3.17
5	Endapan Aluvium Dan Pantai	54,550.12	18.95
6	Formasi Latimojong	34,746.12	12.07
7	Formasi Toraja	18,232.65	6.34
8	Granit Kambuno	6,548.75	2.28
Grand Total		287,806.38	100.00

Sumber : Hasil Analisis GIS



Gambar 4.4 Peta Geologi

f. Hidrologi

Potensi sumber daya air yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu tergolong baik dimana terdapat 11 sungai yang cukup besar dan panjang, yang mengalir dari arah barat ke arah timur atau wilayah Teluk Bone kesebelas sungai tersebut masing-masing adalah Sungai Lamasi yang melintasi Kecamatan Walenrang Barat, Walenrang dan Kecamatan Lamasi, Sungai Makawa melintasi Kecamatan Lamasi Timur, Sungai Bua melintasi Kecamatan Bua, Sungai Pareman (Noling) melintasi Kecamatan Bupon, Ponrang, Ponrang Selatan dan Kecamatan Kamanre, Sungai Bajo melintasi Kecamatan Bajo Barat, Bajo dan Kecamatan Belopa, Sungai Suli melintasi Kecamatan Suli Barat dan Kecamatan Suli, Sungai Larompong melintasi Kecamatan Larompong, Sungai Tembo'e melintasi Kecamatan Larompong Selatan, Sungai Rantebelu melintasi Kecamatan Larompong, Sungai Sampano melintasi Kecamatan Larompong Selatan, Sungai Kandoa (Balambang) melintasi Kecamatan Bua. Dari 11 sungai tersebut yang terpanjang adalah sungai Pareman (Noling) dengan panjang tercatat sekitar 73 km. Sepuluh sungai lainnya panjangnya tercatat sekitar 12 – 69 km. Dengan potensi sungai tersebut di atas sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber air baku, pengairan persawahan, perkebunan,

pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan sarana transportasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta berikut.



g. Klimatologi

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, dan perputaran, pertemuan arus udara. Pada dasarnya di Kabupaten Luwu terdapat dua musim pada satu periode yang sama. Untuk wilayah bagian utara (WAL-MAS) musim hujan jatuh pada bulan oktober sampai bulan maret, sedangkan wilayah bagian selatan (dari Kecamatan Bua sampai Kecamatan Larompong Selatan) musim hujan jatuh pada bulan april sampai dengan bulan september. Dalam beberapa tahun terakhir ini, keadaan musim di Kabupaten Luwu kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang, rata-rata curah hujan selama tahun 2015 berkisar 203,14 mm per bulan.

Suhu udara pada suatu tempat di daerah tropik antara lain ditentukan oleh ketinggian tempat terhadap permukaan laut. Secara umum Kabupaten Luwu beriklim tropik dengan temperature udara pada tahun 2015 berkisar dari 22,17°C sampai dengan 32,03°C. Pada Daerah pegunungan yakni Kecamatan Latimojong, Bassesangtempe.

Kecepatan angin di Kabupaten Luwu berkisar antara 3 sampai 21 knot. Kecepatan angin terkadang tinggi pada musim peralihan dengan arah angin barat yang mempengaruhi masyarakat pesisir dengan pekerjaan nelayan yang batal melaut dan masyarakat pegunungan yang memiliki pertanian perkebunan pada daerah dataran tinggi dimana sering terjadinya tanaman produksi yang tumbang khususnya tanaman cengkeh serta masyarakat dataran yang memiliki persawahan yang terkadang tanaman padi mereka rebah sehingga kualitas dan kuantitas hasil produksinya menurun.

h. Penggunaan Lahan

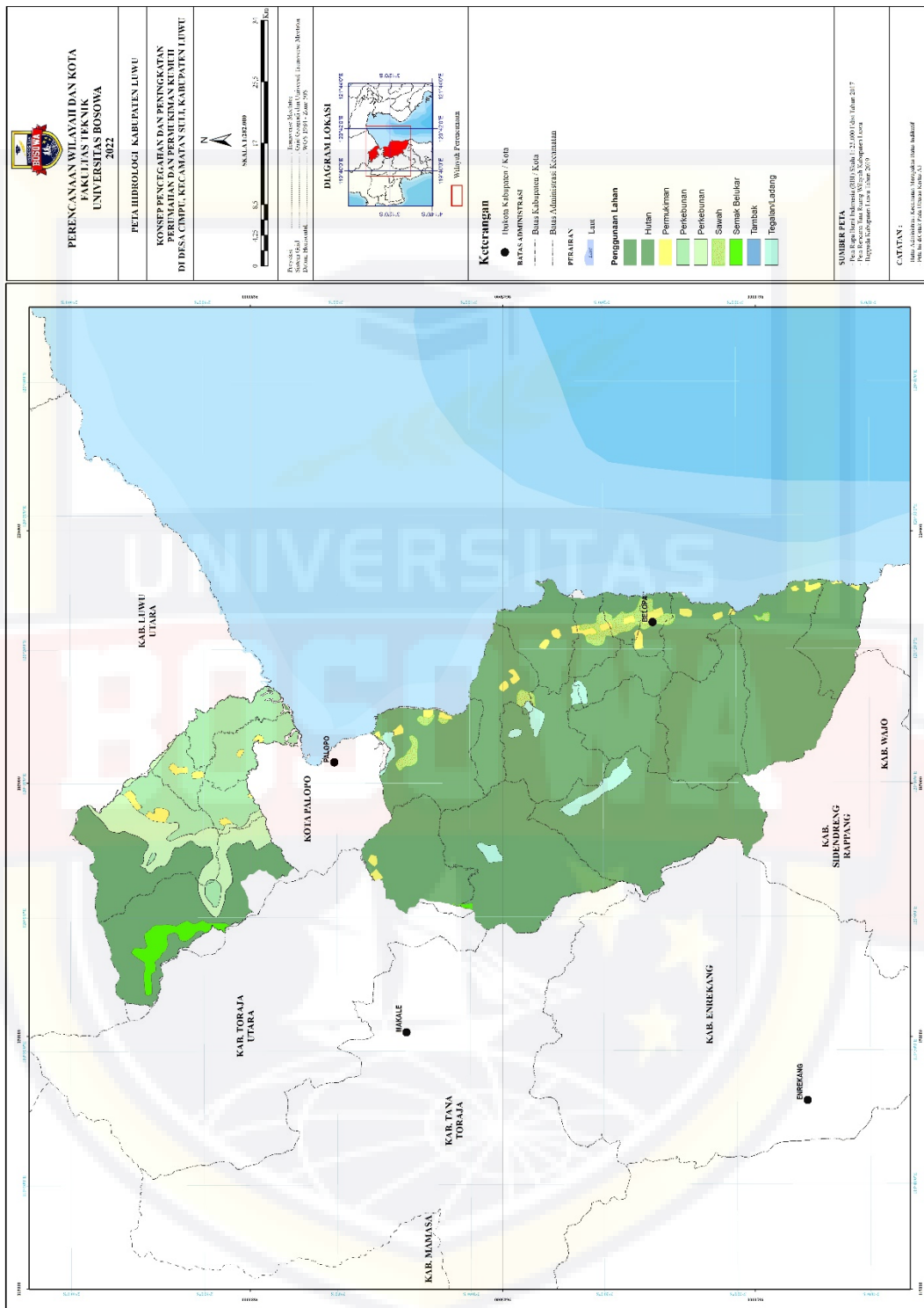
Kabupaten Luwu memiliki luas penggunaan lahan sebesar 494,790.94 ha dengan berbagai jenis penggunaan lahan. Berdasarkan hasil Analisis GIS terdapat tujuh jenis penggunaan lahan di Kabupaten Luwu. Penggunaan lahan yang paling dominan yaitu tegalan/ladang seluas 210,381.50 (29.83%) dan hutan seluas 110,841.83 Ha (22,40%). Adapun penggunaan lahan paling sedikit adalah permukiman yaitu seluas 4,758.11 Ha (0.54%) dan persawahan seluas 4,671.51 Ha (0,62%). Lebih jelas mengenai luasan dan prosentase penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Luwu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Luwu Tahun 2022

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)	Prosentase (%)
1	Hutan	110,841.83	22.40
2	Permukiman	4,758.11	0.54
3	Perkebunan	120,779.08	13.82
4	Persawahan	4,671.51	0.62
5	Semak Belukar	20,469.68	2.73
6	Tambak	22,889.19	3.14
7	Tegalan/Ladang	210,381.50	29.83
	Jumlah	494,790.94	100.00

Sumber : Hasil Analisis GIS

Selain penggunaan lahan sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, maka masih terdapat penggunaan lain yaitu lahan perkebunan dengan luas yaitu 120,779.08 Ha (13.82%), semak belukar yaitu seluas 20,469.68 Ha (2.73%), dan tambak yaitu seluas 22,889.19 Ha (3.14%).



Gambar 4.6 Peta Penggunaan Lahan

i. Kependudukan

Kabupaten Luwu merupakan wilayah yang masih berkembang dengan penambahan penduduk masih berfluktuasi meningkat, penduduk Kabupaten Luwu berdasarkan data dari Dukcapil sebanyak 370,68 ribu jiwa yang terdiri atas 186,58 ribu jiwa penduduk lakilaki dan 184,10 ribu jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu tahun 2019 mencapai 124 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 22 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Lamasi dengan kepadatan sebesar 538 jiwa/km² dan yang terendah di Kecamatan Latimojong sebesar 13 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya mengenai distribusi dan tingkat kepadatan penduduk kabupaten Luwu pada tahun 2020 adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Jumlah dan Sebaran Penduduk Kabupaten Luwu Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
1	Larompong	225,25	22,80	101	104,37
2	Larompong Selatan	131	18,40	140	98,60
3	Suli	81,75	21,86	267	98,48
4	Suli Barat	153,5	10,13	66	108,26
5	Belopa	59,26	19,05	321	96,47
6	Kamanre	52,44	12,52	239	99,19
7	Belopa Utara	34,73	17,89	515	99,64
8	Bajo	68,52	16,49	241	98,93
9	Bajo Barat	66,3	10,42	157	102,29
10	Bassesangtempe	178,12	6,24	35	111,10

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
11	Latimojong	467,75	6,12	13	111,08
12	Bassesangtempe Utara	122,88	7,80	63	110,84
13	Bupon	182,67	15,74	86	103,50
14	Ponrang	107,09	27,83	260	100,13
15	Ponrang Selatan	99,98	26,03	260	100,42
16	Bua	204,01	32,81	161	99,45
17	Walentrang	94,6	18,61	197	98,99
18	Walentrang Timur	63,65	16,15	254	102,60
19	Lamasi	42,2	22,71	538	101,29
20	Walentrang Utara	259,77	18,81	72	102,26
21	Walentrang Barat	247,13	8,81	36	110,39
22	Lamasi Timur	57,65	13,48	234	101,06
Luwu		3.000,25	370,68	124	101,34

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Dalam Angka, Tahun 2021

j. Sistem Pola Permukiman

Berdasarkan pemanfaatan lahannya maka sebanyak 4.758,11 Ha dari wilayah Kabupaten Luwu merupakan Permukiman. Pembentukan pusat-pusat permukiman dalam kondisi eksisting Kabupaten Luwu dipengaruhi oleh tingkat kemiringan tanah yang terdapat di kabupaten ini.

Pola-pola permukiman sendiri dapat di definisikan sebagai bentukan awal dari sekelompok perumahan yang berada dalam satu kesatuan batas tertentu yang dilengkapi oleh berbagai fasilitas pendukung lingkungan mempermudah tingkat pelayanan dan kesejahteraan penduduk yang mendiaminya.

Kebijakan pemerintah dalam bidang perumahan ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat dengan cara perbaikan mutu fisik dan fasilitas lingkungan, secara intensif dan disentif.

2. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan

a. Aspek Fisik Dasar

1) Letak Geografis dan Administrasi

Kecamatan Suli adalah salah satu kecamatan dalam lingkup wilayah Kabupaten Luwu yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kecamatan Belopa;

Sebelah Timur : Teluk Bone;

Seelah Selatan : Kecamatan Larompong; dan

Sebelah Selatan : Kecamatan Suli Barat.

Wilayah Administrasi Kecamatan Suli dengan luas 81,75 Km² terbagai dalam 12 desa dan 1 kelurahan. Adapun Desa Botta dan Desa Padang Lambe merupakan 2 desa terluas dengan luas masing-masing 17,17 Km² dan 16,00 Km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7 Luas dan Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Suli Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Dusun/Lingk	Luas (Km)	Presentasi Luas
1	Tawondo	4	5,79	5,86
2	Murante	4	5,58	5,92
3	Suli	8	9,25	9,36
4	Buntu Kunyi	4	8,33	8,43

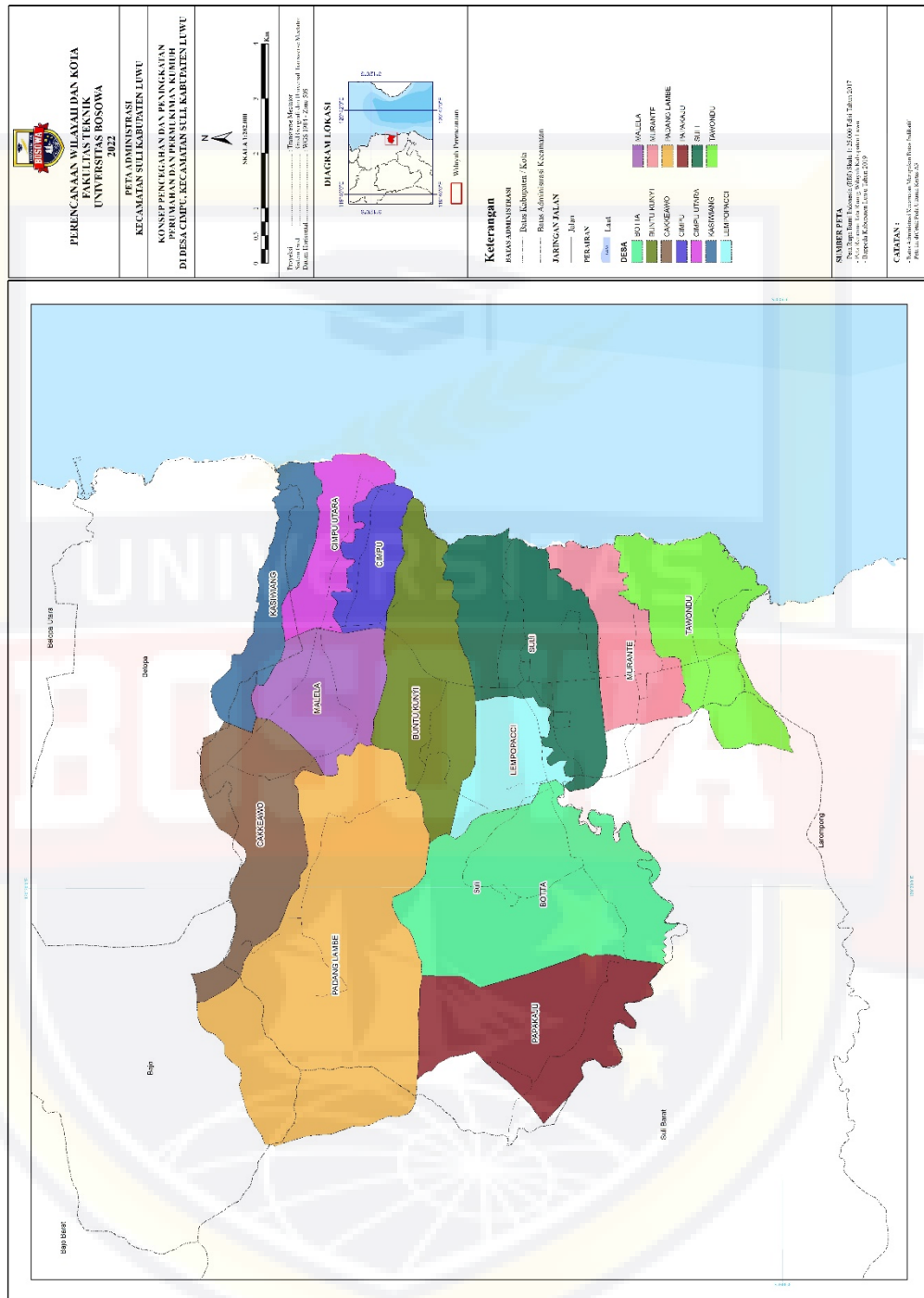
No	Desa/Kelurahan	Dusun/Lingk	Luas (Km)	Presentasi Luas
5	Lempopacci	4	6,25	6,32
6	Botta	3	17,17	17,37
7	Padang Lambe	4	16	16,18
8	Cakkeawo	3	3,12	3,16
9	Malela	4	5,4	5,46
10	Cimpu	4	3,39	3,43
11	Kasiwiang	3	3,12	3,16
12	Papakaju	4	9	9,1
13	Cimpu Utara	4	6,2	6,27
Jumlah		53	81,75	100

Sumber : BPS Kecamatan Suli Dalam Angka, Tahun 2021

UNIVERSITAS

BOSOWA





Gambar 4.7 Peta Administrasi Kecamatan Suli

2) Topografi dan Kemiringan Lereng

Tinggi wilayah Kecamatan Suli berkisar 0 – 750 m di atas permukaan laut. Kecamatan Suli memiliki topografi dan lereng yang relatif datar serta berada pada daerah dataran rendah. Dipandang dari sisi lereng, maka secara garis besar Kecamatan Suli juga berada pada daerah kelerengan antara 0 – 8% . Secara alami faktor letak lintang atau ketinggian suatu wilayah dari permukaan laut (dpl) berpengaruh terhadap lingkungan fisik seperti suhu dan jenis flora dan fauna yang mendiaminya yang berdampak kepada potensi pengembangan penggunaan lahan.

3) Geologi dan Jenis Tanah

Kecamatan Suli merupakan daerah dataran rendah yang berada di jalur pesisir Kabupaten Luwu, yaitu dari Larompong, Suli, Belopa, Ponrang, dan Kecamatan Bua serta daerah pesisir sekitarnya, terdiri atas Batuan Gunungapi Baturape-Cindako (pusat erupsi), Batuan Gunungapi Lamasi (lava andesit, basal, breksi gunungapi, batupasir, setempat mengandung felspatoid, umumnya terkloritkan dan terkarsatkan).

4) Hidrologi

Pada wilayah Kecamatan Suli, terdapat 6 (enam) sungai, diantaranya yaitu Desa Lempopacci di (Sungai Lempopacci), Desa Cimpu (Sungai Cimpu), Desa Malela (Sungai Malela), Desa

Cakkaewo (Sungai Cakkeawo), dan Desa Cimpu Utara (Sungai Cimpu Utara).

b. Demografi

1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan Suli memiliki jumlah penduduk sebanyak 19.202 jiwa yang terbagi dalam 13 Desa/Kelurahan di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Suli dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Suli Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		laki-laki	Perempuan	
1	Tawondo	574	601	1.175
2	Murante	821	917	1.738
3	Suli	2.048	2.373	4.421
4	Buntu Kunyi	570	613	1.183
5	Lampopacci	484	531	1.015
6	Botta	725	734	1.459
7	Padang Lambe	391	391	782
8	Cakkeawo	412	459	871
9	Malela	697	855	1.552
10	Cimpu	906	981	1.887
11	Kasiwang	329	374	703
12	Papakaju	281	382	763
13	Cimpu Utara	774	879	1.653
Jumlah		9.112	10.090	19.202

Sumber : Kecamatan Suli Dalam Angka Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dengan jumlah 10.090 jiwa dari pada

jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki yang hanya berjumlah 9.112 jiwa.

2) Laju Pertumbuhan Penduduk

Tiap tahun jumlah penduduk di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena tingginya angka kelahiran.

Tabel 4.9 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Suli Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Penduduk
1	Tawondu	0,44	6,12
2	Murante	0,4	9,05
3	Suli	0,43	23,02
4	Bunti Kunyi	0,42	6,16
5	Lempopacci	0,5	5,29
6	Botta	0,34	7,6
7	Padang Lambe	0,39	4,07
8	Cakkeawo	0,35	4,54
9	Malela	0,45	8,08
10	Cimpu	0,43	9,83
11	Kasiwang	0,57	3,66
12	Papakaju	0,39	3,97
13	Cimpu Utara	0,49	8,61
Jumlah		0,43	100

Sumber : Kecamatan Suli Dalam Angka, Tahun 2021

3. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kawasan Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, lebih tepatnya berada di Dusun Mura Utara Desa Cimpu Utara dan Dusun Muara selatan Desa Cimpu dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian ini merupakan Kawasan yang

saat ini menjadi lokasi permukiman kumuh berdasarkan hasil verifikasi RP2KPKPK Kabupaten Luwu.

Secara administrasi Kawasan Cimpu memiliki luas wilayah mencapai 11,96 Ha yang terbagi atas 2 dusun dan 2 RT, yang mana posisi geografis terletak pada LS 3° 26' 0,304" BT 120° 23' 56,967".

Batas-batas wilayah administrasi meliputi :

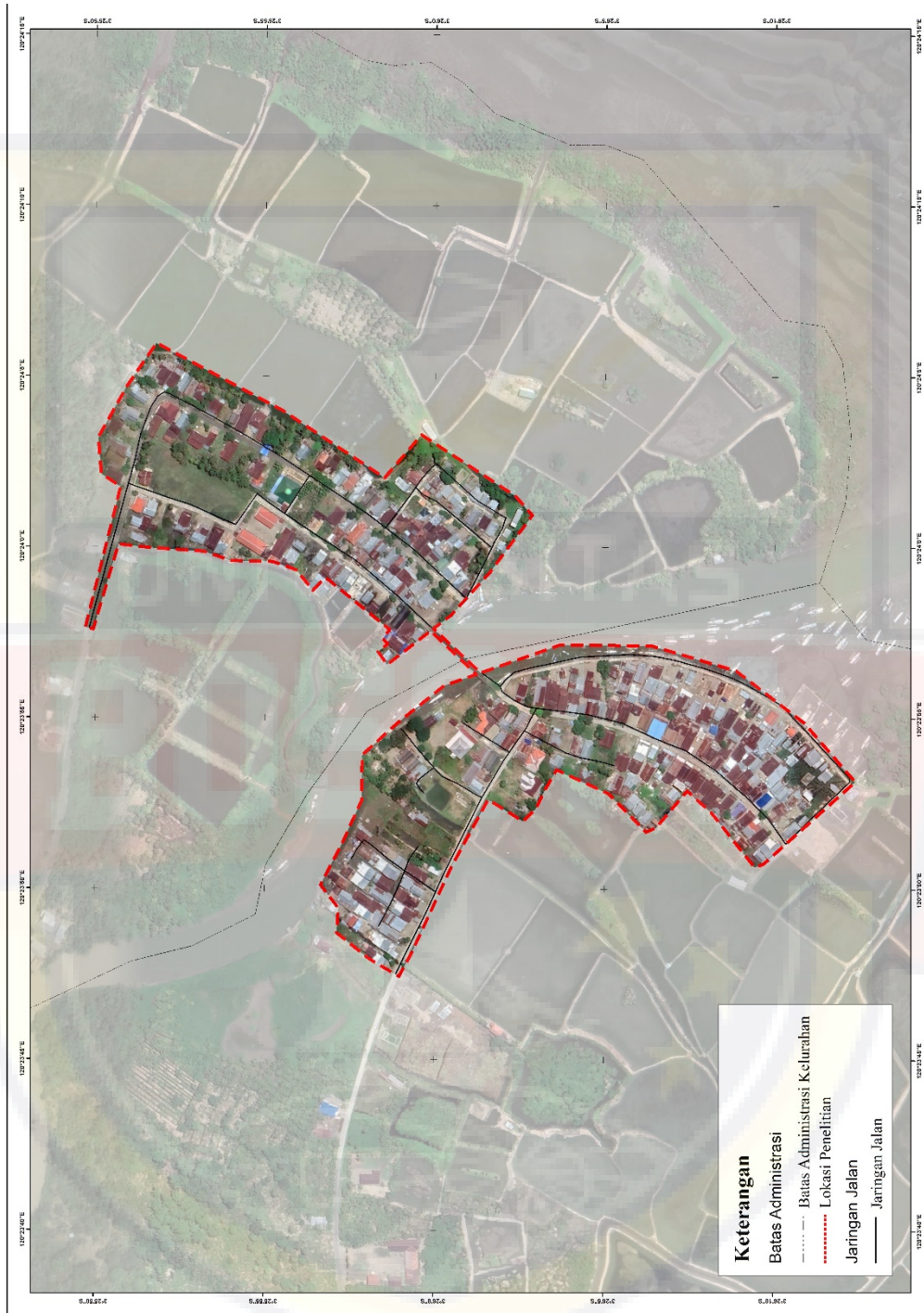
Sebelah Utara : Dusun Mura Utara

Sebelah Selatan : Desa Suli

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Barat : Dusun Buntu Siapa dan Dusun Lagoari

Jumlah penduduk di Kawasan Cimpu pada tahun 2022 adalah 1.088 jiwa yang tersebar di 2 Dusun. Berdasarkan Total Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 410 jiwa dan perempuan sebanyak 678 jiwa. Dengan jumlah rumah tangga sebanyak 297 KK.



Gambar 4.8 Peta Lokasi Penelitian

a. Profil dan Karakteristik Kawasan Penelitian

1) Bangunan Gedung

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan, kondisi bangunan gedung di Kawasan Cimpu memiliki ketidak teraturan bangunan yang memiliki permasalahan pada atap yang masih ada beberapa rumah yang kurang layak, apabila turun hujan membasahi dalam rumah. Kondisi dinding yang masih adanya beberapa rumah masih menggunakan dinding dari atap bekas. Begitupun dengan kondisi lantai yang beberapa rumah masih menggunakan lantai dasar yang membuat tingkat kenyamanan berkurang.

2) Kondisi Jalan Lingkungan

Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan kondisi jalan lingkungan masih belum memenuhi lebar badan jalan sehingga apabila dalam keadaan mendesak membuat mobil ambulans tidak bisa menjemput masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan kondisi spesifikasi dilokasi penelitian masih banyak jalan yang kurang memenuhi persyaratan teknis. Jaringan jalan merupakan prasarana penghubung antar wilayah atau kawasan, oleh karena itu dibutuhkan sasaran dengan ketentuan standar kebutuhan pelayanan yang berlaku.

3) Kondisi Penyediaan Air Bersih

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan kondisi penyediaan air bersih belum terpenuhi secara kuantitas dan kualitas, seperti yang kita ketahui air minum/ bersih merupakan suatu kebutuhan pokok di kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara oleh masyarakat sumber air yang digunakan lebih dominan menggunakan Sumur Bor untuk Air minum. Air bersih menjadi syarat mutlak yang harus tersedia di setiap wilayah untuk mendukung seluruh aktivitas masyarakat karena air bersih adalah kebutuhan pokok setiap individu guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

4) Kondisi Drainase Lingkungan

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan kondisi sistem jaringan drainase yang terdapat di lokasi penelitian merupakan sistem jaringan drainase terbuka yang mengikuti pola jaringan jalan. Kondisi drainase masih kurang baik karena belum mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan/banjir Ketika terjadi hujan.

5) Kondisi Pengolahan Air Limbah

Aktivitas mandi, buang air kecil, buang air besar, mencuci dan sebagainya pasti menghasilkan air limbah. Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan kondisi

pengelolaan air limbah di lokasi penelitian belum baik karena sistem pengolahan air limbah tiap rumah belum sesuai dengan standar teknis yang berlaku.

6) Pengolahan Persampahan

Berdasarkan hasil observasi pengamatan langsung di lapangan kondisi pengolahan persampahan cenderung kurang maksimal dalam pengelolaannya, sarana persampahan di Kawasan Cimpu tidak terpenuhi, akibatnya pengelolaan persampahan di masyarakat menjadi kumuh dan kurang dikelola dengan baik, didukung dengan prasarana persampahan di lokasi penelitian juga tidak terpenuhi seperti tidak adanya tempat penampungan sementara (TPS) yang layak untuk pengelolaan sampah.

Akibatnya sarana dan prasarana persampahan yang cenderung tidak terpenuhi membuat masyarakat di lokasi penelitian melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara dibakar tiap hari bahkan Sebagian lainnya membuang sampah di sungai.

7) Ketersediaan Proteksi Kebakaran

Berdasarkan hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa tidak tersedianya proteksi kebakaran pada kawasan penelitian. Akibatnya, masih kurangnya bentuk mitigasi kebakaran pada kawasan penelitian.

B. ANALISIS TINGKAT KECUMUHAN

Untuk mengetahui tingkat kekumuhan di Kawasan Cimpu menggunakan alat analisis skoring baseline berdasarkan Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Adapun hasil analisis skoring baseline di Kawasan Cimpu yaitu sebagai berikut.



Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Parameter Tingkat Kekumuhan di Kawasan Cimpu

Kawasan	Informasi lokasi					Aspek	Parameter Data	Kondisi	
	Luas (ha)	Koordinat	Lingkungan	Kel/Desa	Kec			Jumlah	Satuan
Cimpu	11.96	120° 23' 56,967" E – 3° 26' 0,304" S	Dusun Muara Utara dan Dusun Muara Selatan	Cimpu dan Cimpu Utara	Suli	Bangunan Gedung	Bangunan/rumah yang tidak memiliki keteraturan	297	Unit
							Bangunan memiliki tingkat kepadatan tinggi tidak sesuai ketentuan ((Luas kawasan dengan kepadatan ≥ 250 unit/Ha untuk kota besar dan ≥ 200 unit/Ha untuk kota sedang/kecil))	25	Ha
							Bangunan yang tidak memenuhi syarat teknis bangunan (kecukupan luas, keamanan,kenyamanan, kesehatan, kemudahan)	112	Unit
						Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan (Panjang Jalan Ideal)	7,128	Meter
							Cakupan Pelayanan Jalan (Panjang Jalan Eksisting)	1,000	Meter
							Panjang jalan dengan permukaan jalan rusak (yang sudah terstruktur aspal/paving block/beton)	6,128	Meter
						Penyediaan air minum	Penduduk yang tidak terakses air minum yang berkualitas (bersih, tidak berbau dan tercemar)	200	KK
							Penduduk yg belum terpenuhi kebutuhan air minum secara kuantitas (60 liter/hari)	112	KK
						Drainase Lingkungan	Luas area yang terkena genangan (Genangan dengan >30 cm, >2 jam , $> 2x$ per tahun)	10.50	Ha
							Panjang Drainase Ideal	7,128	Meter
							Panjang saluran drainase Eksisting	1,000	Meter

Kawasan	Informasi lokasi					Aspek	Parameter Data	Kondisi	
	Luas (ha)	Koordinat	Lingkungan	Kel/Desa	Kec			Jumlah	Satuan
							Panjang saluran drainase dengan kualitas konstruksi buruk	6,128	Meter
						Pengelolaan air limbah	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar	200	KK
							Jumlah KK dengan Sarana Prasarana air limbah tidak sesuai dengan standar teknis	112	KK
						Pengelolaan persampahan	Jumlah KK dengan sarana prasarana pengolahan sampah yang tidak sesuai dengan standar teknis	200	KK
							Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai dengan standar teknis	112	KK
						Proteksi kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	297	Unit
							Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	297	Unit

Sumber: Hasil Survey Lapangan, 2022

Tabel 4.11 Kriteria dan Indikator Penentuan Tingkat Kekumuhan di Kawasan Cimpu

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan (Fisik)						
1.	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RTRW, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan, meliputi pengaturan blok bangunan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 	3	Dokumen RTRW & RPJMD, Format Isian Observasi
		Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • KDB melebihi ketentuan RTRW, dan/atau RTBL • KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau • Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> ○ Untuk kota metropolitan dan kota besar ≥ 250 unit/Ha ○ Untuk kota sedang dan kota kecil ≥ 200 unit/Ha 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% -100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	5	Dokumen RTRW & RPJMD, Dukumen IMB Format Isian Peta Lokasi

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dampak lingkungan • Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum • Keselamatan bangunan gedung (BG) • Kenyamanan BG • Kemudahan BG 	<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	1	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB dan Observasi
2.	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • 76% -100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi dan Observasi
		Kualitas Permukaan JalanLingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • 76% -100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk 	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi dan Observasi
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	<ul style="list-style-type: none"> • 51%-75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman 	3	Wawancara, Format Isiani dan Observasi
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	1	Wawancara, Format Isiani dan Observasi
4.	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 kali setahun	<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	1	Wawancara, Format Isiani dan Observasi

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		Ketidakterediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal	<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan 	3	Wawancara, Format Isiani, Peta GIS dan Observasi
		Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	3	Wawancara, Format Isiani, Peta GIS dan Observasi
		Tidak Terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik : <ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan rutin ; dan/atau Pemeliharaan berkala 	<ul style="list-style-type: none"> 76% -100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 	5	Wawancara, Format Isiani, Peta GIS dan Observasi
		Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 	3	Wawancara, Format Isiani, Peta GIS dan Observasi
5.	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	3	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana : <ul style="list-style-type: none"> Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; 	<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis 	1	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat 			
6.	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan Sarana Persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> 51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis 	3	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> Pewadahan dan pemilahan domestik; Pengumpulan lingkungan; Pengangkutan lingkungan; Pengolahan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar 	1	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik : <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan rutin; dan/atau • Pemeliharaan berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara 	1	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi
7.	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Pasokan air; • Jalan lingkungan; • Sarana komunikasi; • Data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan • Bangunan pos kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 	5	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi
		Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Alat Pemadam Api Ringan (APAR); • Mobil pompa; • Mobil tangga sesuai kebutuhan; dan • Peralatan pendukung lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 	5	Wawancara, Format Isiani, Peta RIS dan Observasi
TOTAL NILAI IINDIKATOR					58.0	
					KONDISI KEKUMUHAN	KUMUH SEDANG
B.	Identifikasi Legalitas Lahan					
1.	Legalitas Lahan	Kejelasan status penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain 	(+)	Wawancara, Format Isiani, Dokumen Pertanahan dan Observasi

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat) dengan bukti ijin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pihak lain 			
		Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK)	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan lokasi berada pada Zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR 	(+)	Wawancara, Format Isiani, Dokumen RTRW, RDTR dan Observasi
C.	Identifikasi Pertimbangan Lain					
1.	Pertimbangan Lain	Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi strategis kabupaten/kota; atau • Bukan fungsi strategis kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota 	1	Wawancara, Format Isiani, Dokumen RTRW, RDTR dan Observasi
		Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi : <ul style="list-style-type: none"> • Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; • Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha • Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan penduduk pada lokasi sebesar <151 jiwa/Ha 	1	Wawancara, Format Isiani, Statistik dan Observasi

NO	ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> Sangat padat yaitu kepadatan penduduk diatas 400 jiwa/ha 			
		Kondisi Sosial, ekonomi dan budaya	<p>Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> Potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; Potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara 	2	Wawancara, Format Isiani dan Observasi

Sumber: Hasil Analisis berdasarkan Permen PUPR No. 2 Tahun 2016

Tabel 4.12 Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Kawasan Cimpu

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
KONDISI KEKUMUHAN																			
71 – 95	Kumuh Berat						x												
45 - 70	Kumuh Sedang							x	x	x	x	x	x						
19 – 44	Kumuh Ringan	x	x	x	x	x								x	x	x	x	x	x
LEGALITAS LAHAN																			
(+)	Status Lahan Legal	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		x		x		x		x		x		x		x		x		x
PERTIMBANGAN LAIN																			
7 – 9	Pertimbangan Lain Tinggi													x	x				
4 – 6	Pertimbangan Lain Sedang	x	x	x	x			x	x	x	x					x	x		
1- 3	Pertimbangan Lain Rendah					x	x					x	x					x	x
SKALA PRIORITAS PENANGANAN		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber: Hasil Analisis berdasarkan Permen PU No. 2 Tahun 2016

Berdasarkan hasil analisis skoring baseline menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan di Kawasan Cimpu mendapatkan nilai 58 yang masuk dalam tingkat kumuh sedang. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan, masih luasnya area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan dan memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk. Selain itu masih luasnya area yang memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau, dan juga di Kawasan Cimpu tidak memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran.

C. ANALISIS KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN PERMUKIMAN KUMUH

Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh diawali dari isu strategis dan permasalahan kawasan kumuh yang ada di Kawasan Cimpu. Isu dan permasalahan tersebut dirumuskan berdasarkan 7 aspek kekumuhan yang selanjutnya dibutuhkan konsep dan strategi dalam pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh. Rumusan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh disusun berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 yang memuat prinsip desain universal.

Konsep pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh bertujuan agar tidak terbentuk kawasan kumuh baru. Selain itu, bukan hanya mencegah kawasan yang sudah terbangun agar tidak menjadi

kumuh tetapi juga menghindari kota/kabupaten tidak menjadi kumuh di masa depan dengan memperhatikan hal-hal penyebab kekumuhan dan membangun *enabling environment*. Selain itu, konsep peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh disusun berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan masing-masing kawasan kumuh dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Adapun hasil konsep pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh di Kawasan Cimpu yaitu sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung

Konsep pencegahan pada aspek bangunan gedung pada kawasan penelitian yaitu Pengawasan, Pengendalian, dan Pemberdayaan dengan konsep kampanye lingkungan rumah sederhana sehat, sedangkan konsep peningkatan pada bangunan gedung yaitu peremajaan dengan strategi penanganan rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi semula serta melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bangunan tidak layak huni. Berdasarkan permen PU no. 29 tahun 2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung. Standarisasi bangunan yang dimaksud memiliki standar keselamatan, keandalan bangunan memenuhi

kriteria gedung hijau, dan standar kualitas pembangunan. Dibandingkan di kawasan cimpu bangunan/rumah yang tidak memiliki keteraturan dan bangunan yang tidak memenuhi syarat teknis bangunan (kecukupan luas, keamanan,kenyamanan, kesehatan, kemudahan).

2. Jalan Lingkungan

Adapun konsep pencegahan pada aspek jalan lingkungan meliputi pengawasan dan pengendalian dengan strategi melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai standar jalan lingkungan. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan, standar jalan lingkungan permukiman yaitu jalur selebar ± 4 m yang ada dalam satuan permukiman atau lingkungan perumahan dibandingkan di Kawasan cimpu Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis dan Sebagian jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman.

3. Air Bersih

Konsep pencegahan pada aspek air bersih meliputi pemberdayaan dengan strategi pendampingan dan pelayanan informasi, sedangkan konsep peningkatan aspek air bersih yaitu

peremajaan dengan strategi penyediaan jaringan air minum peningkatan kapasitas air bersih permukiman. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan, kapasitas minimum untuk air bersih adalah 60 liter/orang/hari. Lingkungan perumahan harus mendapat air bersih yang cukup dari perusahaan air minum atau sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibandingkan di Kawasan Cimpu Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari dan Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.

4. Drainase Lingkungan

Konsep pencegahan pada aspek drainase lingkungan meliputi Pengawasan, Pengendalian, dan Pemberdayaan dengan strategi melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebersihan lingkungan, sedangkan konsep peningkatan yaitu peningkatan kapasitas saluran drainase permukiman Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan, kapasitas minimum untuk air bersih adalah 60 liter/orang/hari. Lingkungan perumahan harus mendapat air bersih yang cukup dari

perusahaan air minum atau sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibandingkan di Kawasan Cimpu Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari dan Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.

5. Air Limbah

Konsep pencegahan pada aspek air limbah yaitu pemberdayaan dengan strategi penanganan pendampingan dan pelayanan informasi sedangkan konsep peningkatan yaitu peremajaan dengan strategi penyediaan saluran air limbah permukiman peningkatan kapasitas saluran air limbah permukiman. Berdasarkan SNI-03-2398-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan, serta pedoman tentang pengelolaan air limbah secara komunal. Lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah yang memenuhi ketentuan perencanaan plambing yang berlaku dibandingkan di Kawasan cimpu Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki

septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

6. Persampahan

Konsep pencegahan dan peningkatan pada aspek persampahan meliputi pemberdayaan dan pemukiman kembali dengan strategi penanganan yaitu sosialisasi penanganan persampahan dan pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan persampahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Persyaratan Sarana Pemilahan Dan Pewadahan Sebagaimana Didasarkan Pada Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, Dan Fasilitas Lainnya Dalam Melakukan Pemilahan Sampah Wajib Menyediakan Sarana Pemilahan Dan Pewadahan Sampah Skala Kawasan. Dibandingkan di Kawasan Cimpu Prasarana, Sarana Pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan dan standar teknis

7. Proteksi Kebakaran

Konsep pencegahan dan peningkatan pada aspek proteksi kebakaran meliputi Pengendalian, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat serta pemugaran dengan strategi penanganan Sosialisasi Pencegahan penanggulangan kebakaran dan penyediaan hydrant kebakaran pada unit-unit lingkungan permukiman. Berdasarkan Permen PU Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan Tersedianya prasarana dan sarana proteksi kebakaran pada lokasi, dibandingkan proteksi kebakaran di kawasan cimpu masih tidak memiliki prasarana dan sarana proteksi kebakaran.

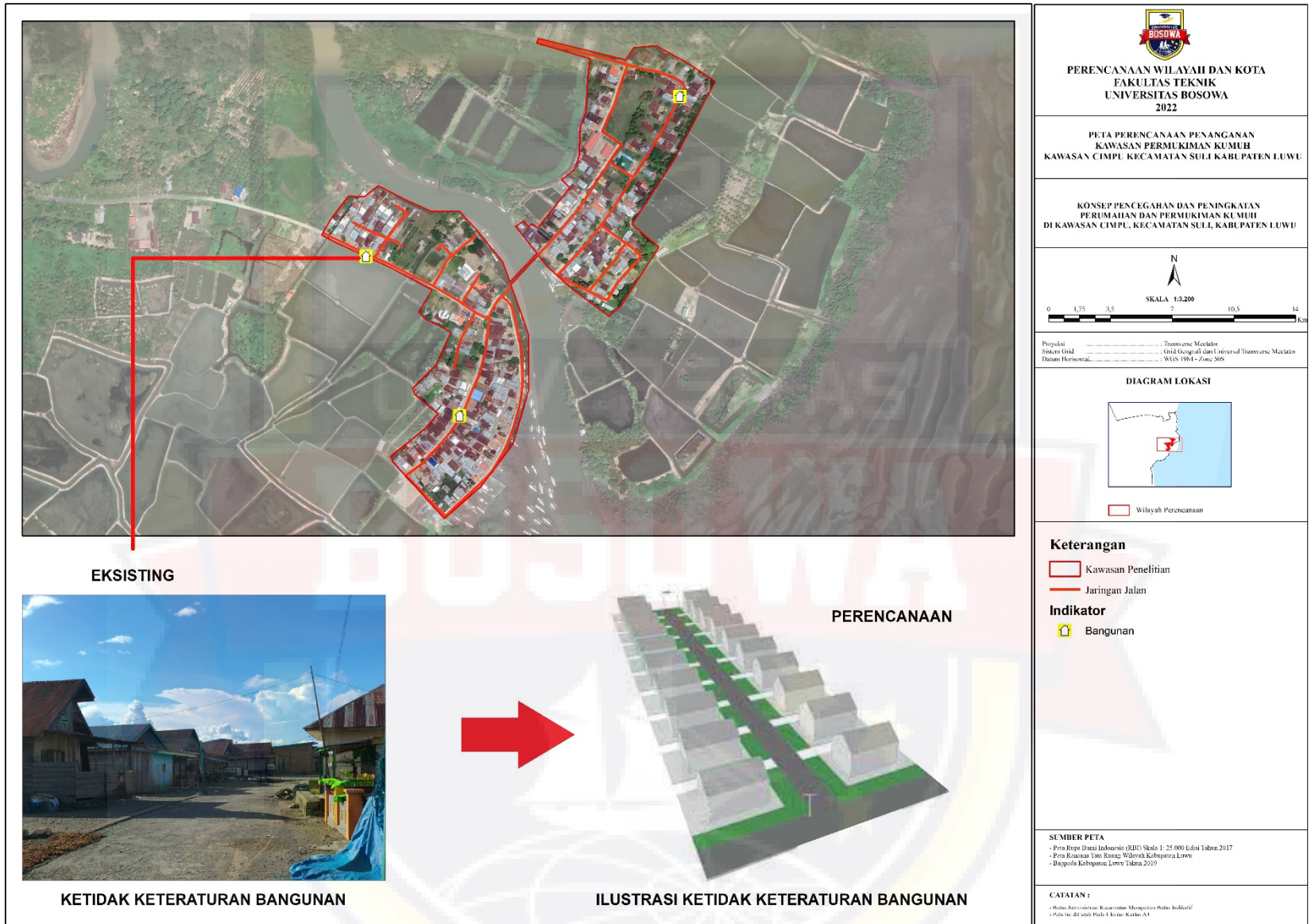
Untuk lebih jelas mengenai analisis konsep pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh pada lokasi penelitian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.13 Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan Cimpu

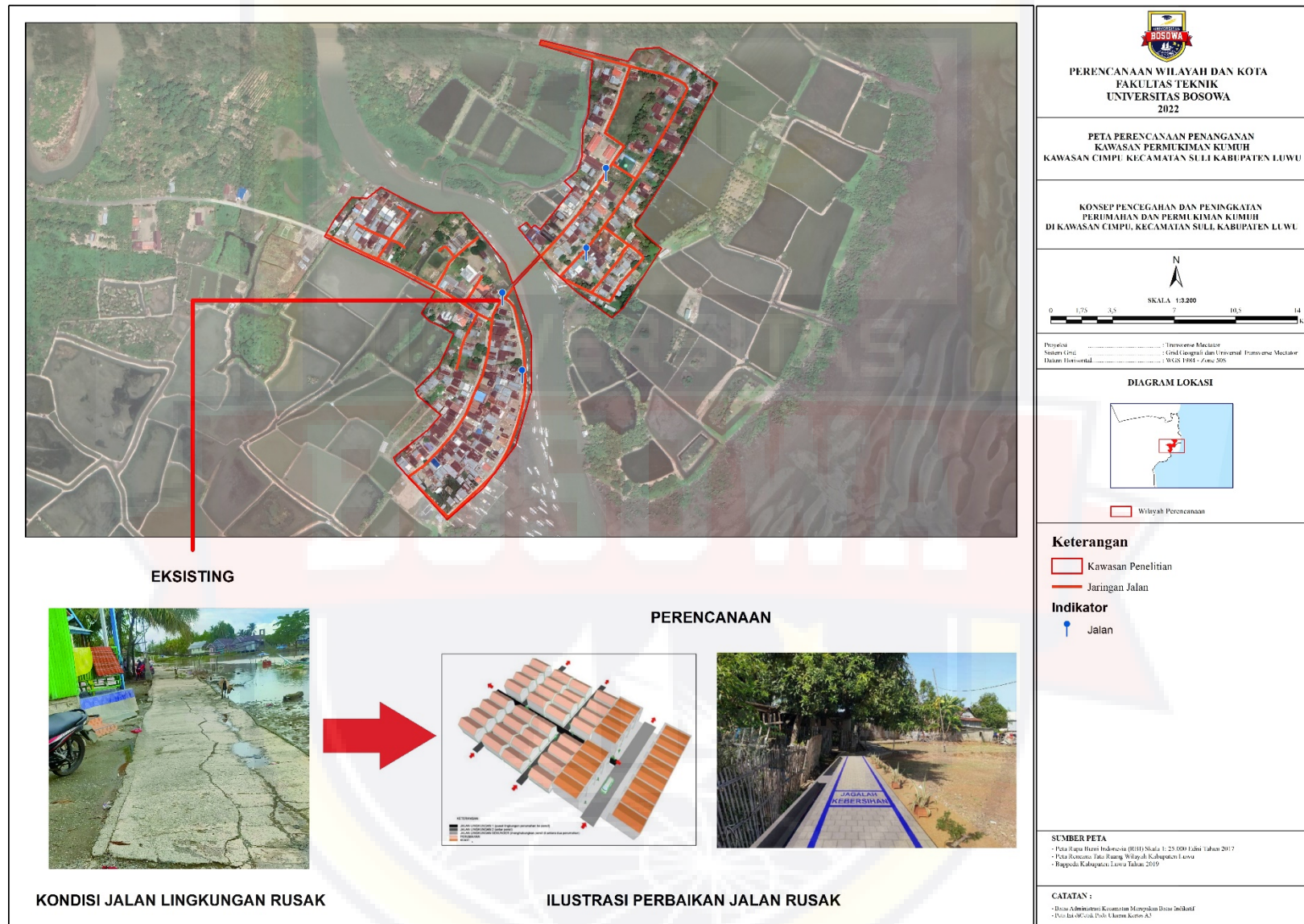
Kawasan Kumuh	Aspek Yang Diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Cimpu	Bangunan Gedung	112unit bangunan yang tidak layak huni	Pengawasan Pengendalian Pemberdayaan	Peremajaan	Kampanye lingkungan rumah sederhana sehat	Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali seusai kondisi semula Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bangunan tidak layak huni
	Jalan Lingkungan	1.000 m jalan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar teknis	Pengawasan Pengendalian	Peremajaan	Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masy. mengenai standar jalan lingkungan	Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman
	Air Bersih	112unit rumah tidak dapat mengakses air bersih	Pemberdayaan	Peremajaan	Pendampingan dan pelayanan informasi	Penyediaan jaringan air minum Peningkatan kapasitas air bersih permukiman
	Drainase Lingkungan	Saluran Drainase lingkungan yang tidak berfungsi optimal dengan panjang 1.128 Meter	Pengawasan Pengendalian Pemberdayaan	Peremajaan	Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masy. mengenai kebersihan lingk.	Peningk. kapasitas saluran drainase permukiman
		Pembangunan Drainase lingkungan	Pengawasan Pengendalian Pemberdayaan	-	Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada	-

Kawasan Kumuh	Aspek Yang Diamati	Permasalahan	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
			Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
		dengan Panjang 1.128 Meter			masy. mengenai pembangunan drainase lingk.	
	Saluran Air Limbah	112 KK tidak memiliki sistem pengelolaan air limbah dan 10 Ha Kawasan tidak memiliki pengelolaan air limbah	Pemberdayaan	Peremajaan	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peyediaan saluran air limbah permukiman Peningkatan kapasitas saluran air limbah permukiman
	Pengelolaan Persampahan	200 KK dengan sarana prasarana pengolahan sampah yang tidak sesuai dengan standar teknis	Pemberdayaan	Permukiman kembali	Sosialisasi penanganan persampahan	Pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan persampahan
	Proteksi Kebakaran	11,96 Ha tidak memiliki proteksi kebakaran	Pengendalian, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	Sosialisasi Pencegahan penanggulangan kebakaran	Penyediaan hydrant kebakaran pada unit-unit lingkungan permukiman

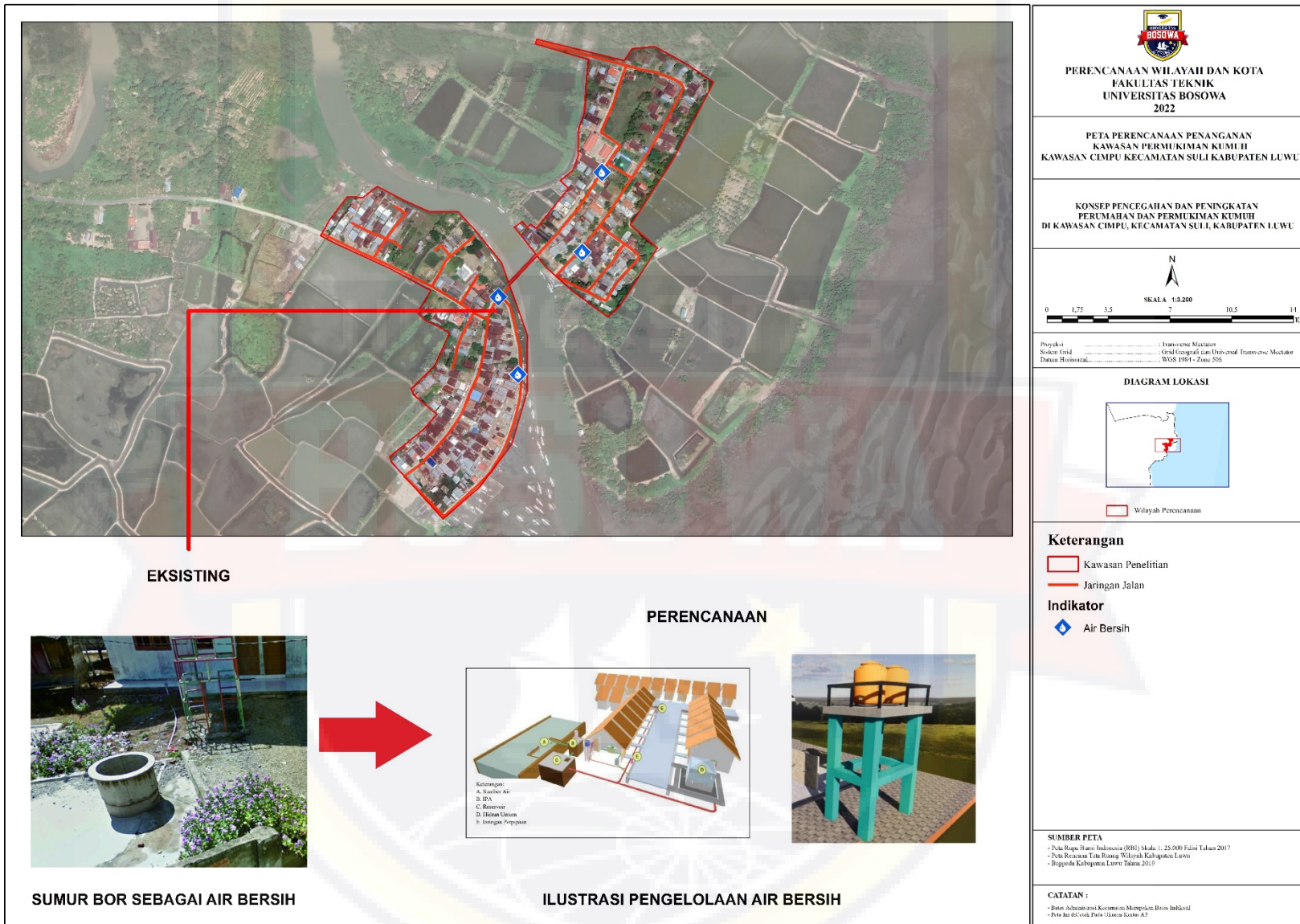
Sumber: Hasil Analisis berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018



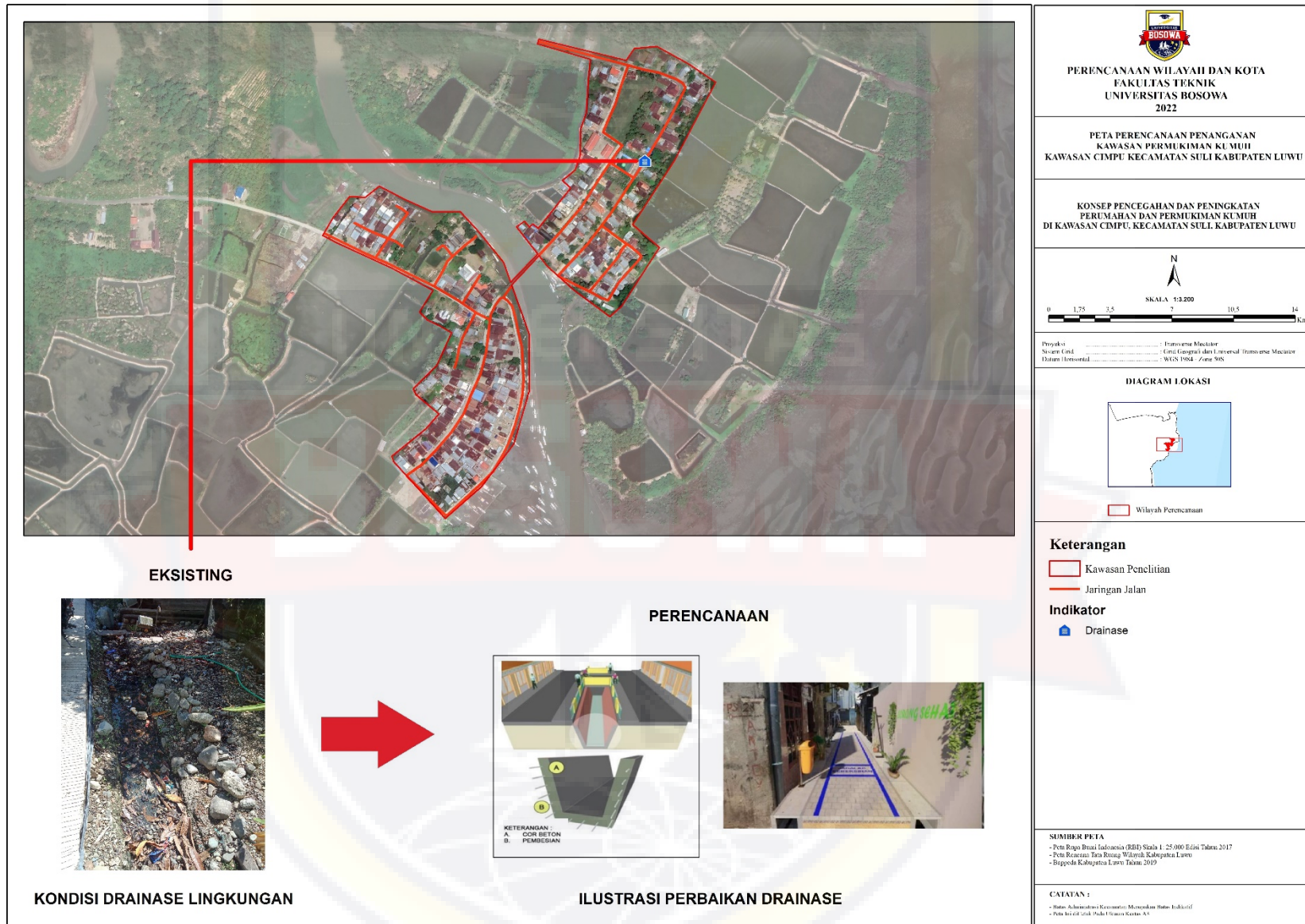
Gambar 4.8 Peta Konsep Perencanaan Aspek Bangunan



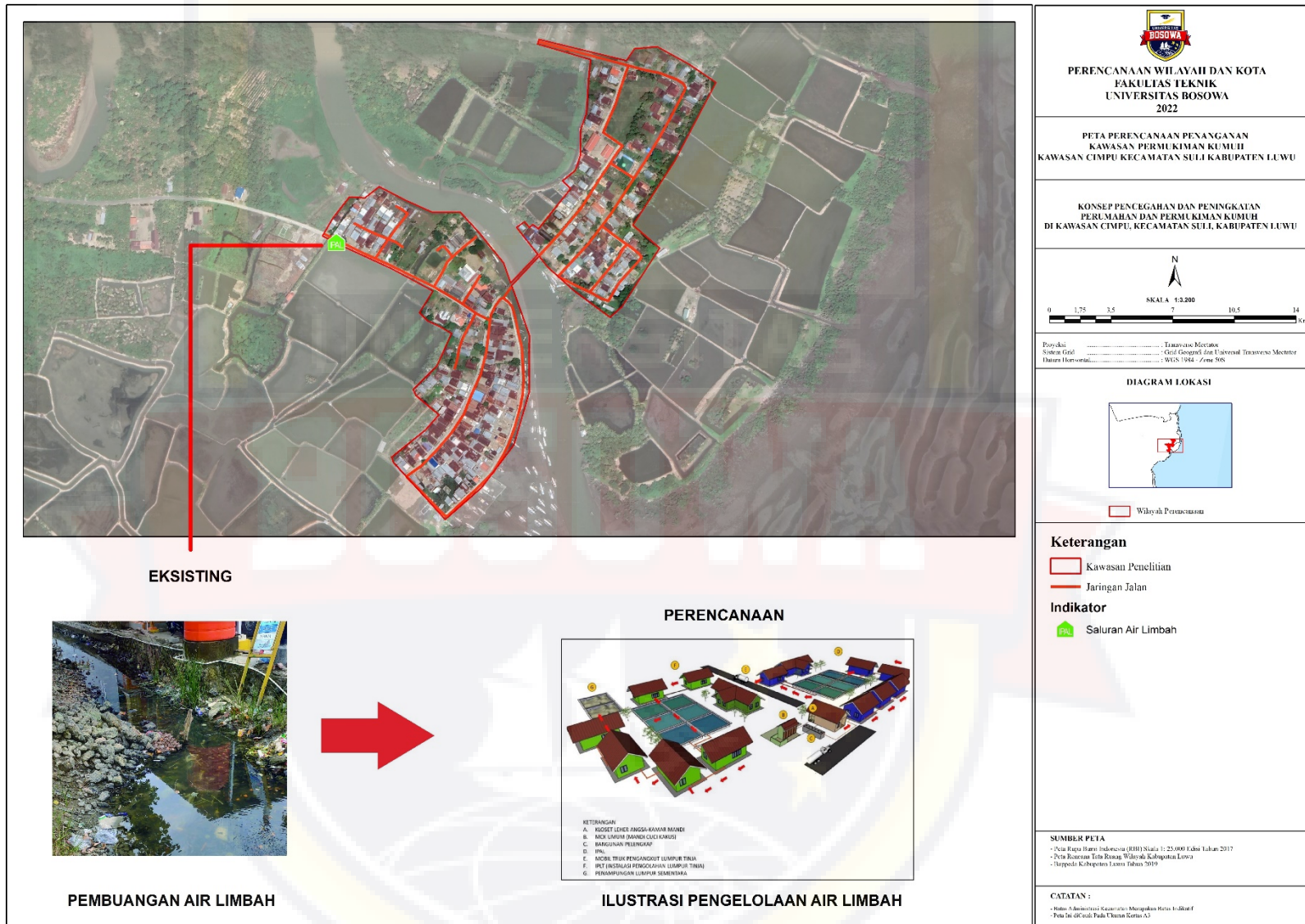
Gambar 4.9 Peta Konsep Perencanaan Aspek Jaringan



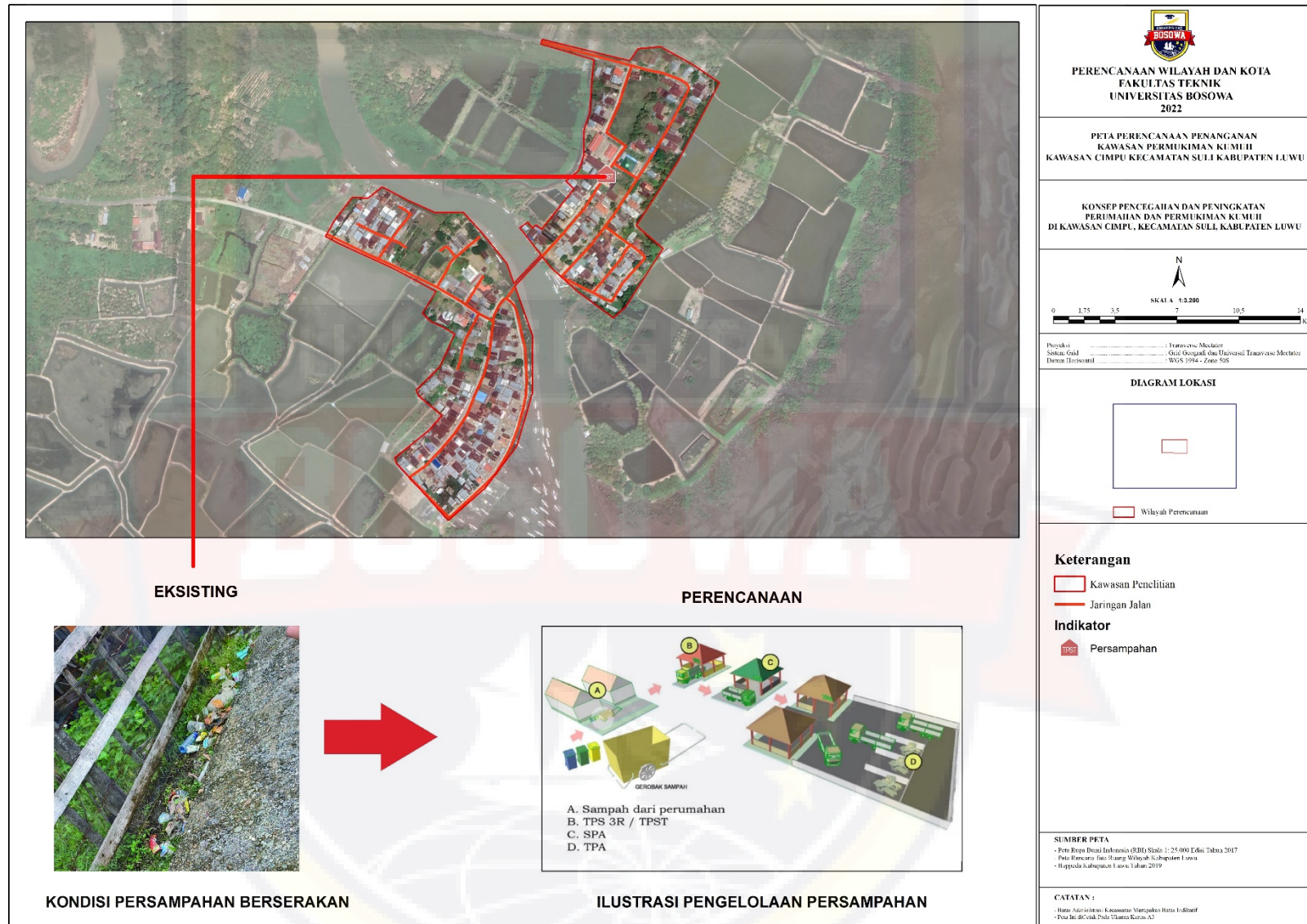
Gambar 4.10 Peta Konsep Perencanaan Aspek Air Bersih



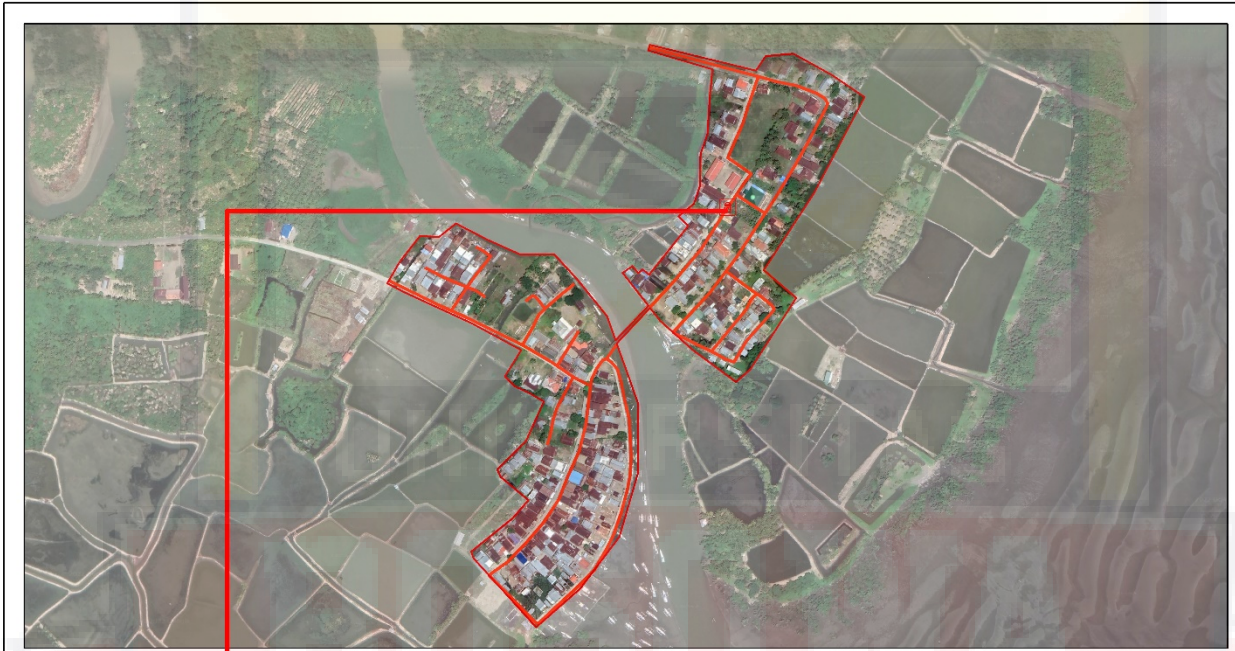
Gambar 4.11 Peta Konsep Perencanaan Aspek Drainase



Gambar 4.12 Peta Konsep Perencanaan Aspek Air Limbah



Gambar 4.13 Peta Konsep Perencanaan Aspek Persampahan



EKSISTING

PERENCANAAN ILUSTRASI




KONDISI JALAN YANG TIDAK BISA DILALUI MOBIL PEMADAM KEBAKARAN



KETERANGAN
A. SUNGAI
B. SAK PEMAMPONGAN AIR
C. PISA PEMADAM KEBAKARAN




ILUSTRASI PENANGANAN PROTEKSI KEBAKARAN



**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOALA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA
2022**

PETA PERENCANAAN PENANGANAN
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
KAWASAN CIMPU, KECAMATAN SULLI, KABUPATEN LUWU


KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KAWASAN CIMPU, KECAMATAN SULLI, KABUPATEN LUWU



SKALA 1:12.200

Proyeksi : UTM Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 48E

DIAGRAM LOKASI



□ Wilayah Perencanaan

Keterangan

- Kawasan Penelitian
- Jaringan Jalan

Indikator

- Proteksi Kebakaran

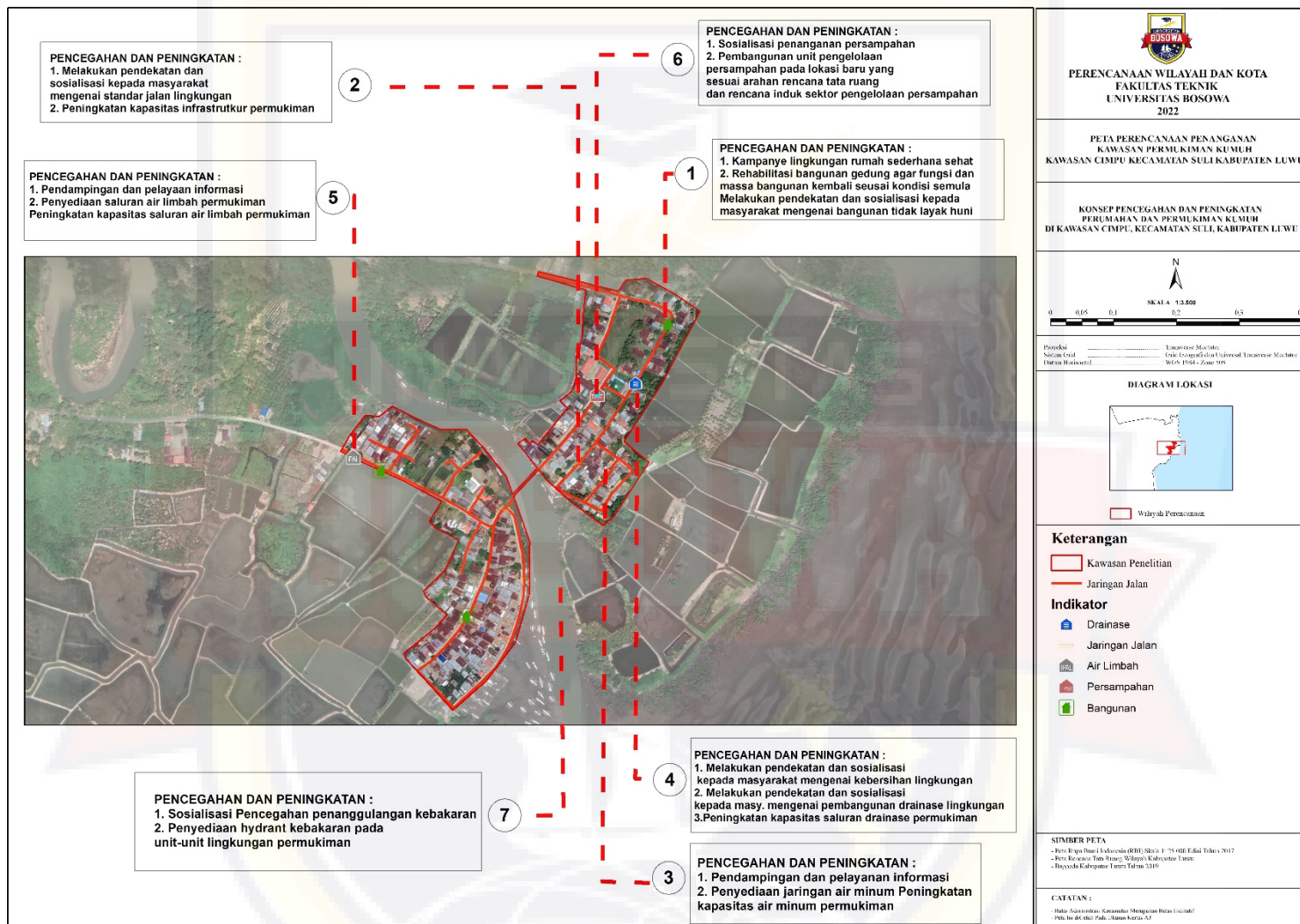
SUMBER PETA

- Peta Rupa Bumi Luwulawa (RBL) Skala 1:25.000 Edisi Tahun 2017
- Peta Kecamatan Lusu Rupa Rupa Wilayah Lusu
- Rappada Kabupaten Luwu Tahun 2019

CATATAN :

- Hasil Administrasi Kecamatan Menghasilkan Status Indikator
- Peta ini di buat Pada Tahun: 2022

Gambar 4.14 Peta Konsep Perencanaan Aspek Proteksi Kebakaran



Gambar 4.15 Peta Site Plan Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan beberapa tahapan dan proses dalam penelitian, menghasilkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis skoring baseline menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu masuk dalam kategori kumuh sedang. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan, masih luasnya area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan dan memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk. Selain itu masih luasnya area yang memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau, dan juga di Kawasan Cimpu tidak memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
2. Konsep pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu terdiri atas dua, yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas. Konsep pencegahan dilaksanakan melalui pola pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan konsep peningkatan

kualitas dilaksanakan melalui pola pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali,

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini agar ditindak lanjuti secara nyata, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini memeperlihatkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam terbentuknya permukiman kumuh berdasarkan variabel yang digunakan, sehingga terdapat juga variabel yang berpengaruh dari luar terhadap pengaruh terbentuknya permukiman kumuh.
2. Diharapkan kepada studi selanjutnya sebaiknya mencari variabel baru dari penataan Kawasan permukiman kumuh, tidak hanya mengacu pada variable sosial ekonomi dan faktor fisik lingkungan saja, sehingga penelitian selanjutnya dapat terlihat menarik untuk di kaji dan dibahas
3. Perlu adanya penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai strategi pencegahan ataupun penanganan kawasan permukiman kumuh. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan munculnya temuan-temuan baru yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merencanakan dan menjalankan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrams, Charles. (1964). *Man's Struggle For Shelter In An Urbanizing World*. London : Cambridge.
- Budiharjo, Eko. (1997). *Arsitektur Pembangunan dan Konservasi*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Doxiadis C.A. (1971). *Ekistics: An Introduction to the Science of Human Settlement*. London: Hutchinson.
- Etta Mamang Sangadji, Sopiha. (2010). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta.
- Komarudin. (1997). *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*, Yayasan Realestatet Indonesia.
- Kuswartojo T. dan Salim S.A. (1997). *Perumahan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moleong, Lexy J, (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Niracanti, Galuh Aji. (2001) *Studi Perubahan Penggunaan Ruang Permukiman Kampung Kauman Semarang*. Tugas Akhir S1. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14
Tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Terhadap
Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2
Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Sastra, S., & Marlina, E. (2006). Perencanaan dan pengembangan
perumahan. *Penerbit Andi, Yogyakarta.*

Silas, J. (1996). Kampung Surabaya menuju Metropolitan. Bappeko,
Surabaya.

Sinulingga, B.D. (2005) Pembangunan Kota. Tinjauan Regional dan
Lokal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan
Perumahan Di Perkotaan

Suud, B., & Navitas, P. (2015). Faktor-faktor Penyebab Kekumuhan
Permukiman di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan
Kenjeran, Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 4(1), C33-C35.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Bandung: PT Alfabet.

Suparlan, Parsudi. (1993). Kemiskinan Di Perkotaan. Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Permukiman

Yudohusodo, Siswono, (1991), Rumah Untuk Seluruh Rakyat,
INKOPPOL, Jakarta



LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

JUDUL : KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN PERMUKIMAN KUMUH

(STUDI KASUS: PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN CIMPU, KECAMATAN SULI, KABUPATEN LUWU)

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang konsep pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh di Kawasan cimpu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan Saudara saya sebagai peneliti memohon dengan hormat kesediaan Saudara untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini atas kesediaan dan partisipasi Saudara sekalian untuk mengislas kuesioner saya atas nama Ibrahim Jabir B mahasiswa Universitas Bosowa Makassar, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2018 mengucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR PERTANYAAN RUMAH TANGGA UNTUK PENDATAAN			
A. INFORMASI UMUM			
Provinsi : <i>sulawesi selatan</i>	Nama Kepala Rumah Tangga : <i>Nasir</i>		
Kab/Kota : <i>luwu</i>	Jumlah Kepala Keluarga : <i>5</i>		
Kelurahan/Desa : <i>cimpu</i>	Status Rumah Tangga : <i>MBR/Non MBR</i>		
Tanggal : <i>13 maret 2022</i>	Jumlah Anggota Rumah Tangga : <i>5</i> jiwa		
Pendataan	Laki-laki : <i>2</i> jiwa	Perempuan : <i>3</i> jiwa	Disabilitas : <i>0</i> jiwa
A.1 KETERATURAN BANGUNAN HUNIAN			
1 Apakah bangunan hunian memiliki AKSES LANGSUNG ke jalan dan tidak terhalang oleh bangunan lain?	a <input checked="" type="checkbox"/> Ya	b <input type="checkbox"/> Tidak	
2 Apakah POSISI MUKA bangunan hunian menghadap jalan ?	a <input checked="" type="checkbox"/> Ya	b <input type="checkbox"/> Tidak	
3 Apakah posisi bangunan hunian langsung menghadap sungai/laut/rawa/danau dan/atau TIDAK berada di atas sungai/laut/rawa/danau?	a <input type="checkbox"/> Tidak ada sungai/laut/rawa/ danau	b <input type="checkbox"/> Ya	c <input checked="" type="checkbox"/> Tidak
4 Apakah bangunan hunian berada di atas lahan sempadan sungai/laut/rawa/danau?	a <input type="checkbox"/> Tidak ada sungai/laut/rawa/ danau	b <input checked="" type="checkbox"/> Tidak	c <input type="checkbox"/> Ya
5 Apakah bangunan hunian berada di daerah buangan limbah pabrik atau di bawah jalur listrik tegangan tinggi (sutet)?	a <input checked="" type="checkbox"/> Tidak	b <input type="checkbox"/> Ya	
A.2 KELAYAKAN BANGUNAN HUNIAN			
6 Berapa luas lantai bangunan hunian?	(a) Panjang:m	(b.) Lebar:m	(c.)Jumlah Lantai:
7 Berapa jumlah penghuni bangunan hunian?	: <i>5</i> jiwa		
8 Berapa luas lantai bangunan hunian/ jiwa?	a <input type="checkbox"/> $\geq 7,2$ meter ² / jiwa	b <input type="checkbox"/> $< 7,2$ meter ² / jiwa	
9 Bagaimana kondisi atap terluas?	a <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Bocor	b <input type="checkbox"/> Bocor	
10 Bagaimana kondisi dinding terluas?	a <input checked="" type="checkbox"/> Baik	b <input type="checkbox"/> Rusak	
11 Apakah jenis lantai terluas?	a <input checked="" type="checkbox"/> Bukan Tanah	b <input type="checkbox"/> Tanah	
A.3 AKSES AIR MINUM			
12 Dari mana sumber utama AIR MINUM, MANDI, CUCI didapat? - pilih salah satu dari pilihan jawaban. (jika jawaban c, d, e, maka lanjut ke no. 13)	a <input type="checkbox"/> Ledeng Meteran/SR	b <input type="checkbox"/> Ledeng Tanpa Meteran	c <input checked="" type="checkbox"/> Sumur Bor/Pompa
	d <input type="checkbox"/> Sumur Terlindungi	e <input type="checkbox"/> Mata Air Terlindungi	f <input type="checkbox"/> Air Hujan
	g <input type="checkbox"/> Air Kemasan/ air isi ulang	h <input type="checkbox"/> Sumur tak terlindungi	i <input type="checkbox"/> Mata Air tak Terlindungi
	j <input type="checkbox"/> Sungai/Danau/Kolam	k <input type="checkbox"/> tangki/mobil/ gerobak air	
13 Bila jawaban No. 12 di atas sumur bor, sumur terlindungi atau mata air terlindungi, maka berapa jarak ke penampungan tinja/kotoran terdekat (termasuk milik tetangga)?	a <input type="checkbox"/> ≥ 10 m	b <input type="checkbox"/> < 10 m	
14 Apakah kebutuhan air minum, mandi, cuci terpenuhi sepanjang tahun?	a <input checked="" type="checkbox"/> Tercukupi/terpenuhi sepanjang tahun	b <input type="checkbox"/> Tercukupi hanya pada bulan tertentu	c <input type="checkbox"/> Tidak pernah tercukupi
A.4 PENGELOLAAN SANITASI			
15 Dimana biasanya anggota rumah tangga Buang Air Besar? (jika jawaban c, maka lanjut ke nomor 18)	a <input type="checkbox"/> Jamban sendiri/ bersama (maks 5 KK untuk 1 jamban bersama)	b <input type="checkbox"/> Jamban umum (jika digunakan >5 KK dan/atau membayar)	c <input type="checkbox"/> Tidak di jamban
16 Apakah jenis kloset yang digunakan?	a <input type="checkbox"/> Leher angsa	b <input type="checkbox"/> Bukan leher angsa (plengsengan/ cemplung/ cubluk/dll)	
17 Dimana limbah tinja dibuang?	a <input checked="" type="checkbox"/> Septictank pribadi/komunal/IPAL	b <input type="checkbox"/> Bukan septictank/IPAL	

A.5 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA			
18 Dimana tempat pembuangan sampah rumah tangga? (jika jawaban c, d, e maka lanjut ke no. 20)	a <input type="checkbox"/> Tempat sampah pribadi	b <input type="checkbox"/> Tempat sampah komunal/ TPS/TPS-3R	c <input type="checkbox"/> Dalam Lubang/dibakar
	d <input checked="" type="checkbox"/> ryang terbuka/ lahan kosong/ jalan	e <input type="checkbox"/> Sungai/Saluran Irigasi/Danau/Laut/ Drainase (Got/Selokan)	
19 Berapa kali pengangkutan sampah dari rumah ke TPS/TPA?	a <input type="checkbox"/> $\geq 2x$ seminggu	b <input type="checkbox"/> $\leq 1x$ seminggu	
A.6 DATA NON-FISIK			
A.6.1 PENDAPATAN RUMAH TANGGA			
20 Apa mata pencaharian utama rumah tangga?	a <input type="checkbox"/> pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan	b <input checked="" type="checkbox"/> Perikanan/ nelayan	
	c <input type="checkbox"/> Pertambangan/ galian	d <input type="checkbox"/> Industri/ pabrik	
	e <input type="checkbox"/> Konstruksi/ bangunan	f <input type="checkbox"/> Perdagangan/ jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)	
	g <input type="checkbox"/> Pegawai pemerintah		
21 Berapa daya Listrik yang digunakan dalam bangunan hunian (Watt)?	a <input type="checkbox"/> ≤ 450	b <input checked="" type="checkbox"/> 900	c <input type="checkbox"/> 1300
	d <input type="checkbox"/> ≥ 2200	e <input type="checkbox"/> menumpang ke tetangga/ tidak punya meteran sendiri/ dll	
A.6.2 PELAYANAN FASILITAS SOSIAL			
22 Apa jenis fasilitas kesehatan yang paling sering digunakan rumah tangga?	a <input type="checkbox"/> Rumah Sakit	b <input type="checkbox"/> Prakter Dokter/ Poliklinik	c <input checked="" type="checkbox"/> Puskesmas/ Pustu
	d <input type="checkbox"/> Dukun/ pengobatan tradisional	e <input type="checkbox"/> Bidan/mantri	f <input type="checkbox"/> Tidak Pernah
23 Di mana lokasi/ letak fasilitas kesehatan yang sering digunakan rumah tangga?	a <input checked="" type="checkbox"/> Di dalam kelurahan/ kecamatan yang sama	b <input type="checkbox"/> Di luar kecamatan	c <input type="checkbox"/> Di kota lain
24 Jika ada anggota rumah tangga usia wajib belajar (9 tahun), di mana lokasi SD/ sederajat dan SMP / sederajat terdekat yang digunakan?	a <input checked="" type="checkbox"/> Di dalam kelurahan/ kecamatan yang sama	b <input type="checkbox"/> di luar kecamatan	c <input type="checkbox"/> di kota lain
	d <input type="checkbox"/> Tidak sekolah	e <input type="checkbox"/> tidak ada anggota rumah tangga usia wajib belajar	
A.6.3 ASPEK PENGUSAHAAN BANGUNAN DAN LAHAN			
25 Apakah status bangunan hunian?	a <input checked="" type="checkbox"/> Milik sendiri	b <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak	c <input type="checkbox"/> Numpang/milik pihak lain
26 Apakah status legalitas bangunan hunian?	a <input checked="" type="checkbox"/> Memiliki IMB	b <input type="checkbox"/> Tidak/belum memiliki IMB	
27 Apakah status lahan bangunan hunian?	a <input checked="" type="checkbox"/> Milik sendiri	b <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak	c <input type="checkbox"/> Numpang/milik pihak lain
28 Apakah status legalitas lahan bangunan hunian?	a <input checked="" type="checkbox"/> SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah	b <input type="checkbox"/> Milik pihak lain/ surat perjanjian lainnya (termasuk surat adat)	c <input type="checkbox"/> Milik pihak lain tanpa surat perjanjian
	d <input type="checkbox"/> Tidak ada / tidak tahu		







DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ibrahim Jabir B, Judul Skripsi “ Konsep Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh Di Kawasan Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu” Lahir di Sidrap tanggal 2 Februari 2000 merupakan anak tunggal dari Bapak Muh Jabir Baharuddin, dan Ibu HJ. A Ippong, Latar belakang Pendidikan, SD Negeri 10 Sidrap (2006-2012), Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 Sidrap (2012-2015), dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK TELKOM MAKASSAR pada tahun (2015-2018), dan selanjutnya pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di salah satu Universitas yang ada di Kota Makassar yaitu Universitas Bosowa Makassar di Fakultas Teknik Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota sampai pada tahun 2022.